PEMBUDIDAYAAN DAN PERDAGANGAN KOPRA DI MINAHASA (1870-1942)

Tesis
Diajukan untuk Mencapai Gelar Magister Humaniora
dalam Bidang Ilmu Sejarah

Oleh
Effendi Wahyono
3792012162

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
BIDANG ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
1996

Tesis yang berjudul **Pembudidayaan dan Perdagangan Kopra di Minahasa (1870-1942)** ini telah di ujikan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 1996, dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. Dr. R. Z. Leirissa .....
2. Pembimbing : Prof. Dr. R. Z. Leirissa .....
3. Anggota : Prof. Dr. A. B. Lapian .....
4. Anggota : Prof. Dr. Ayatrohaedi .....
5. Anggota : Dr. Thee Kian Wie .....
6. Anggota : Dr. Masyhuri .....

Jakarta, ...

Program Pascasarjana

Univesitas Indonesia

Direktur,

Prof. Dr. F. A. Moeloek, dr.

Abstrak

Kopra merupakan produksi rakyat Minahasa dan menjadi mata pencarian utama masyarakat petani daerah tersebut selama periode 1870-1942.

Penelitian tentang pembudidayaan dan perdagangan kopra di Minahasa dalam kurun waktu 1870-1942 ini secara khusus menyoroti struktur pertanian dan pola pembudidayaan serta sistem perdagangan kopra, dengan menggunakan bahan-bahan arsip, laporan-laporan sezaman baik yang diterbitkan maupun tidak, serta literatur yang berkaitan dengan tema tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pertanian di Minahasa, karena adanya tuntutan pasar. Minahasa pada abad ke-17-18 merupakan lumbung padi bagi daerah Sulawesi dan Maluku. Adanya tanaman wajib kopi pada pertengahan abad ke-19 membuat sebagian petani Minahasa beralih menjadi penanam kopi. Kemudian setelah terjadi *boom* kopra sejak akhir abad ke-19 sebagian petani Minahasa beralih menanam kelapa.

Pola perdagangan kopra dilakukan melalui tiga golongan, yaitu produsen, perdagang perantara, dan pedagang besar/ekspor. Pola jual-belinya tidak dilakukan di dalam pasar (dalam arti fisik) secara terbuka, tetapi melalui sistem kontrak.

Jual beli dengan sistem kontrak ini lebih merugikan petani. Untuk melindungi petani dari jeratan pedagang perantara yang sebagian besar dikuasai pedagang Cina, berbagai upaya dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, misalnya dengan mendirikan *volksbank Tonsea, Producten Verkoop Central*, dan yayasan Kopra.

Kata Pengantar

Puji syukur saya sampaikan ke hadirat Allah SWT atas selesainya tesis ini.

Di samping itu, tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan beberapa pihak. Untuk itu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. R. Z. Leirissa atas bimbingannya selama mengikuti perkuliahan di UI dan khususnya dalam penulisan tesis ini. Dari beliau saya memperoleh banyak hal terutama pemahaman teoritis dalam perkembangan historiografi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Prof. Dr. A. B. Lapian yang banyak memberikan pemahaman terhadap metodologi penulisan sejarah, dan Dr. Thee Kian Wie terhadap pemahaman sejarah ekonomi di Indonesia sehingga saya dapat mengambil tema sejarah ekonomi dalam penulisan tesis ini.

Kepada Bapak Susanto Zuhdi M. Hum, Ibu Kristaniarsih, M.A., dan Bapak Kasijanto, M. Hum selaku sekretaris program studi ilmu sejarah saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam berbagai urusan administrasi akademik selama mengikuti kuliah di program pascasarjana UI.

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan UT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan tingkat S2 ini, terutama Prof. dr. Sigit Muryono dan Prof. Dr. Asmawi Zainul.

Dalam hal finansial, selain mendapat TMPD, saya juga mendapat bantuan keuangan untuk penelitian dari *The Toyota Foundation*, karena itu,

kepada kedua lembaga tersebut saya mengucapkan terima kasih.

Selama penelitian saya mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam pengumpulan bahan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan Perpustakaan Fakultas Sastra UI. Kepada keluarga Pantouw di Manado saya mengucapkan terima kasih atas segala informasi selama saya melakukan penelitian dan pengamatan lapangan di sana.

Terakhir, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kuliah, dan teman-teman di lingkungan UT, terutama di Perpustakaan UT atas segala dorongan selama mengikuti pendidikan S2 dalam segala suka dan duka, serta orang tua, kakak-kakak, dan adik-adik atas segala perhatiannya.

Wasalam,

Jakarta, 1996

Penulis

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah dan Kerangka Analisis 10

Pembagian Isi 23

Sumber yang Digunakan 24

Bab II : Geografi dan Perkembangan Sosial Ekonomi

Arti Kata Minahasa 26

Geografi Minahasa 29

Penduduk 36

Pemilikan Tanah 41

Mata Pencaharian 47

Bab III : Tiga Fase Budi Daya Kelapa

Fase Pertama 56

Fase Kedua 61

Fase Ketiga 68

Bab IV : Tiga Fase Perdagngan Kopra dan Sarana Pendukungnya

Tiga Fase Perdagangan Kopra 77

Sistem Jual Beli dan Sarana Pendukungnya 95

Sistem Transportasi 112

Bab V : Kesimpulan 118

Kepustakaan 122

Bab I
Pendahuluan

Latar Belakang

Studi sejarah Indonesia selama ini lebih banyak difokuskan pada kawasan Indonesia bagian Barat, khususnya Jawa meskipun daerah-daerah luar Jawa juga tidak kalah pentingnya dalam perkembangan Indonesia sebagai suatu nasion. Jawa menarik karena menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda. Para ahli sejarah tampaknya lebih tertarik untuk mempelajari dinamika suatu bangsa dari pusat kekuasaan. Jawa sebagai pusat kekuasaan tentu saja lebih lebih menarik daripada daerah-daerah lainnya karena perhatian masyarakat kolonial lebih banyak dipusatkan di Jawa.

Meskipun demikian, merupakan suatu ironi jika pengkajian proses pembentukan suatu negara (Indonesia) hanya dilihat dari kepentingan pemerintah pusat. Mempelajari sejarah Indonesia sebagai suatu negara kesatuan hendaknya juga dilihat dari kepentingan daerah-daerah lainnya dalam proses integrasi.

Mempelajari daerah-daerah luar Jawa dipermudah oleh data-data tertulis peninggalan masyarakat kolonial yang mempunyai kepentingan terhadap daerah-daerah tersebut terutama sejak pertengahan kedua abad ke-19. Setelah pemerintah kolonial menerapkan kebijaksanaan liberalisasi dalam bidang ekonomi dan adanya kejenuhan terhadap produk-produk ekspor konvensional di pasar internasional yang dihasilkan Jawa seperti gula dan kopi, para pengusaha Barat (termasuk Cina dan Jepang) mulai melihat daerah luar Jawa sebagai penghasil barang-barang komoditi

nonkonvensional. Produk-produk andalan daerah luar Jawa yang waktu itu laku di pasar internasional antara lain adalah karet, minyak bumi, dan kopra.

Masuknya sektor swasta di daerah-daerah luar Jawa menyebabkan daerah-daerah itu terbuka bagi dunia perdagangan internasional dan dapat berhubungan langsung dengan pasar-pasar internasional. Di samping itu, sebagai daerah pinggiran, luar Jawa harus mengikuti kebijaksanaan politik, termasuk politik perdagangan yang diputuskan oleh pemerintah pusat di Jawa. Kebutuhan daerah terhadap pusat dan kontrol pusat terhadap daerah merupakan salah satu aspek terwujudnya integrasi wilayah Nusantara sebagai suatu negara kolonial.

Munculnya peranan luar Jawa dalam proses integrasi ditentukan oleh dua faktor sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah adanya kebutuhan untuk berintegrasi luar Jawa dengan Jawa sehingga secara berangsur-angsur membentuk apa yang disebut negara kolonial. Faktor kedua adalah adanya integrasi antara luar Jawa dengan pasar dunia. Luar Jawa banyak menghasilkan barang-barang mentah yang dibutuhkan pasar dunia sehingga pedagang-pedagang luar Jawa dapat mengadakan jaringan perdagangan dengan pasar-pasar komoditi di Cina, India, Timur Tengah, Afrika Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat.[1]

Terbukanya luar Jawa dengan pasar dunia menyebabkan penduduk nonpribumi di kawasan tersebut mengalami kenaikan. Pada tahun 1905

[1]J.Thomas Lindblad, "The economic development of the Indonesian Provincies outside Java in late-and post-colonial times," (paper diskusi di depan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta), Jakarta: 1992, hal. 2.

orang Eropa yang tinggal di kawasan tersebut hanya berjumlah 16 ribu jiwa dan 300 ribu orang Cina, dibandingkan dengan pribumi yang 10 juta jiwa. Pada tahun 1930 penduduk Eropa melonjak menjadi 50 ribu jiwa dan Cina menjadi 700 ribu, sedangkan pribumi 18 juta. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk nonpribumi lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pribumi.[2]

Terbukanya luar Jawa bagi sektor swasta menyebabkan nilai ekspor Hindia Belanda mengalami kenaikan pesat. Pada tahun 1870-an total nilai ekspor Hindia Belanda hanya sekitar 190 juta gulden, naik secara lambat menjadi 220 juta gulden pada tahun 1890-an. Tahun 1905 angka tersebut mengalami lonjakan yang berarti menjadi 300 juta gulden, kemudian naik secara spektakuler menjadi 700 juta gulden pada tahun 1914. Kenaikan nilai ekspor terjadi pada pasca Perang Dunia I (1919/1920) yaitu 2 milyar gulden, kemudian kembali pada angka 1,5 milyar gulden pada dasa warsa 1920-an. Dari angka tersebut, sumbangan luar Jawa terhadap ekspor Hindia Belanda tidak dapat diremehkan dengan kenaikan yang sangat pesat dari 29 persen pada tahun 1905 menjadi 54 persen pada tahun 1925.[3] Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perkembangan luar Jawa lebih pesat daripada Jawa pada periode 1900 sampai 1920-an.

Di samping pertumbuhan nilai perdagangan ekspor tersebut, juga terjadi perubahan struktur dalam jenis-jenis barang yang diperdagangkan, dari pertanian ke nonpertanian seperti minyak bumi dan timah, yang

---

[2]*Ibid.*

[3]J. Thomas Lindblad, "The contribution of foreign trade to colonial state formation in Indonesia, 1900-1930," (Paper dalam seminar Java in The Late Colonial), Wasenar: (tanpa tahun), hal. 2-4.

terutama dihasilkan oleh Kalimantan Tenggara (sekarang Kalimantan Timur), Sumatra Selatan, dan Sumatra Timur (sekarang Sumatra Utara). Di sektor pertanian juga terjadi perubahan dari produk-produk pertanian konvensional seperti gula, tembakau, dan kopi ke produk-produk pertanian baru seperti karet dan kopra. Sebagai gambaran, komposisi ekspor gula pada dasawarsa 1900-an mencapai 35 persen dari keseluruhan jenis barang ekspor Hindia Belanda. Angka itu turun menjadi 32 persen pada dasawarsa berikutnya (1910/1919). Turun lagi menjadi 28 persen pada dasawarsa 1920-an. Sedangkan kopi, tembakau, dan teh dari 32 persen turun menjadi 17 persen dan turun lagi menjadi 14 persen. Sementara itu pada periode yang sama, minyak dan timah dari 12 persen menjadi 20 persen tetapi turun lagi ke angka 18 persen. Karet dan kopra dari 7 persen naik menjadi 16 persen pada dasawarsa 1910-an dan naik lagi pada dasa warsa berikutnya menjadi 24 persen.[4]

Kopra merupakan pelopor utama dari perubahan tersebut. Pembudidayaan kopra dimulai pada akhir abad ke-19. Namun ekpansi yang sebenarnya baru terjadi setelah 1910 karena adanya permintaan yang luar biasa besarnya untuk pembuatan gemuk, sabun, dan margarin. Total ekspor kopra naik dari 40 juta gulden pada tahun 1910 menjadi 100 juta gulden pada tahun 1920-an. Pada tahun 1920-an ekspor kopra Hindia Belanda mencapai 1/3 dari total suplai kopra dunia. Sebagian besar kopra diproduksi oleh orang-orang pribumi dalam bentuk industri rumah tangga[5] terutama di Sulawesi dan Kalimantan Barat. Kapasitas produksi kopra di Sulawesi

---

[4] *Ibid.* hal. 5-7
[5] *Ibid.*

Selatan dan Sulawesi Utara (Menado) sangat luas pada dasawarsa 1920-an, dan tingkat harga kopra menjadi penghasilan utama bagi masyarakat di kedua daerah ini.[6]

Permintaan kopra di pasaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan keuntungan yang memikat tanpa harus bekerja berat setiap hari, membuat masyarakat Minahasa (sekumpulan etnis dari residensi Menado) lebih tertarik menanam kelapa untuk dijadikan kopra daripada tanaman lainnya. Penanaman kelapa secara luas di Minahasa terjadi setelah pertengahan abad ke-19. Ketika Graafland, seorang penginjil Belanda mengunjungi Minahasa pada tahun 1860-an, ia yang kemudian menetap di sana melihat begitu banyak pohon kelapa di sepanjang pantai Minahasa. Namun ia juga melihat bahwa kebun-kebun kelapa yang ada saat itu belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, terutama untuk memasak (minyak kelapa) dan untuk minyak lampu penerang. Waktu itu, orang-orang Minahasa menanam kelapa memang untuk dimakan atau dijadikan minyak.[7] Baru pada tahun 1870-an orang-orang di daerah itu mulai membuat kopra atau kelapa yang dikeringkan karena jenis kelapa itu laku di pasaran. Kebutuhan kopra di pasaran—bahkan pasar internasional—membuat petani kelapa di Minahasa memperluas wilayah penanamannya. Pada periode awal abad ke-20 penanaman kelapa semakin berkembang karena kebutuhan kopra di pasar internasional juga terus meningkat sehingga Minahasa menjadi daerah penghasil kopra yang cukup diperhitungkan, terutama pada dasa warsa kedua abad tersebut.

---

[6]*Ibid.*

[7]N.Graafland, *Minahasa: Negeri, Rakyat, dan Budayanya*, Jakarta: Grafiti, 1991, hal. 73.

Tinjauan Pustaka

Pentingnya Minahasa sebagai penghasil kopra sangat menarik untuk dibicarakan, terutama mulai dasawarsa kedua abad ini hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Kopra merupakan andalan utama dalam perekonomian masyarakat Minahasa. Naik turunnya volume perdagangan di daerah itu sangat tergantung pada naik dan turunnya harga kopra yang memang sangat fluktuatif.

Dalam sistem perdagangan kopra, peranan pedagang Cina dan Arab sebagai pedagang perantara juga sangat menentukan. Di samping itu, usaha pemerintah setempat dalam meningkatkan dan melindungi ekonomi kopra juga sangat menarik untuk dibicarakan. Dalam suasana depresi yang menyulitkan keadaan ekonomi tahun 1930-an, dan dalam suasana Perang Dunia II yang memblokade jalur-jalur ekonomi, pemerintah Belanda tetap melindungi para produsen kopra sehingga mereka tidak jatuh sama sekali.

Hal lain yang menarik dari perkembangan kopra di Minahasa adalah karena—sepengetahuan penulis—belum ada yang membahas tentang produksi dan perdagangan kopra di daerah itu secara mendalam.

B.J.G. Van Settei pernah melakukan studi tentang perkebunan kopra rakayat di Minahasa. Hasilnya kemudian diterbitkan dalam sebuah buku oleh *Departemen van Landbouw, Nijverheid, en Handel, Afdeeling Landbouw,* tahun 1925.[8] Tahun berikutnya kantor Landbouw Tondano menerbitkan buku tentang perkebunan kopra bumiputra dalam bahasa Melayu yang isinya tidak berbeda dengan tulisan Van Settei.[9] Kedua buku terakhir ini

---

[8]B.J.G. Van Settei, *Een en onder over de Volksklapper Cultuur in de Minahassa,* Dept. Van Landbouw, Nijverheid en handel, Afdeling Landbouw, 1925

[9]*Perkeboenan Kelapa Boemi Poetra,* Weltevreden: Landsdrukkerij, 1926

banyak menyoroti tentang arti kelapa secara ekonomi, cara-cara memilih bibit, cara membuat kelapa kering, perdagangan kelapa, serta penghitungan keuntungan penanaman kelapa di Minahasa. Jangka waktu bahasannya pun hanya mencakup tahun 1919-1924.

J.H.R. Broeders juga pernah menulis tentang kualitas kelapa di Sulawesi Utara yang dimuat dalam sebuah mingguan ekonomi selama enam nomor berturut-turut pada tahun 1933.[10] Pada media yang sama pernah dimuat pula sebuah artikel tentang kopra di Minahasa yang mengulas usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas penanaman kelapa di Minahasa. Satu-satunya tulisan yang membicarakan masalah peranan pedagang Cina dalam perdagangan kopra di Minahasa adalah karangan C.T. Bertling yang dimuat dalam sebuah surat kabar terbitan Semarang, tahun 1928.[11]

Studi tentang kopra di Minahasa pernah dilakukan oleh Prof. Dr. R.Z. Leirissa. Dengan mempelajari kontrak-kontrak kopra di daerah tersebut, ia menyimpulkan bahwa sistem kontrak dalam perdagangan kopra di Minahasa merupakan bentuk aliansi antara sektor ekonomi Barat dan Timur.[12]

Masih banyak lagi tulisan tentang Minahasa dan tentang kelapa, terutama dalam artikel lepas yang dimuat di majalah-majalah seperti *Pedoman Tani*, namun tidak dapat semuanya disebutkan di sini karena kasusnya kurang

---

[10]J.H.R. Broeders, "Kwaliteitverbetering van Copra in Noord Celebes," dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indie*, Th. ke-2 (no. 14, 15, 16, 17, 19), 1933

[11]C.T. Bertling, "Chineesche Coprahandel in Minahassa en de Sangir-en Talaud-eiland," dalam *De Locomotief*, 9 Juni 1928

[12]R.Z. Leirissa, "Copracontracten: An Indication of Economic Development in Minahasa During the Late Colonial Period," (Paper presented at the Academy Colloquium Historical Foundation of a National Economy in Indonesia, Amsterdam: Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen, September 1994).

relevan dengan pengkajian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada produksi kelapa di Minahasa serta pengelolaan produksi tersebut dengan titik berat pada sistem pembudidayaan dan perdagangan kopra dalam masa-masa awal abad ini hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia (1942). Periode ini merupakan tahun-tahun ekspansi pemerintah kolonial ke luar Jawa, yang dimulai sejak pemerintah Belanda membuka peluang kepada swasta untuk "mengeksploitasi" Hindia Belanda (Indonesia) secara maksimal (1870-an sampai pecah Perang Dunia II).

Satu lukisan yang cukup lengkap tentang Minahasa pada paroh kedua abad ke-19 adalah catatan perjalanan Graafland. Karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tersebut menguraikan tentang geografi, budaya, dan ekonomi Minahasa secara lengkap.[13]

Aspek-aspek kemasyarakatan dan budaya Minahasa menjadi kajian Kalangi. Bahasan karya itu meliputi sistem mata pencaharian, kekerabatan, kemasyarakatan, dan keagamaan.[14]

Pengkajian Minahasa secara akademis juga pernah dilakukan oleh Prof. Dr. Geraldine Yvonne Jane Manoppo yang merupakan sebuah disertasi doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Sastra di UI. Karya itu membahas tentang bahasa Melayu surat kabar di Minahasa pada abad ke-19. Disertasi tersebut lebih banyak menitikberatkan pada penggunaan bahasa Melayu dalam surat kabar *Tjahaja Sijang*, sebagai surat kabar berbahasa Melayu yang terbit sejak 1869.[15] Kajian akademik tentang Minahasa juga pernah dibuat oleh Hendra dalam sebuah tesis S-2 UI bidang Ilmu-Ilmu Sastra dengan

---

[13]N. Graafland, *Op. Cit.*

[14]N. S. Kalangi, "Orang Minahasa: Beberapa Aspek Kemasyarakatan dan Kebudayaan," (Majalah Lembaga Penelitian Studi DGI), 1980

[15]Geraldine Yvonne Jane Panoppo—Watupongoh, *Bahasa Melayu Surat Kabar di Minahasa Abad ke-19*, Disertasi Doktor UI bidang Ilmu-ilmu Sastra, 1983

mengambil kopi Minahasa abad ke-19 sebagai pokok bahasannya. Melalui tanam paksa kopi, Hendra melihat adanya perubahan dalam masyarakat Minahasa yang disebabkan terutama akibat masuknya sistem ekonomi uang.[16]

Dalam disertasinya yang diterbitkan pada 1976, Mieke Schouten menyoroti perubahan struktur masyarakat Minahasa.[17] David E.F. Henley dalam disertasinya mengkaji Minahasa sebagai suatu bangsa yang telah memiliki kesadaran kebangsaan lebih awal dari kebangsaan Indonesia.[18] Dalam karyanya yang lain ia menelusuri perkembangan nama Minahasa dalam peta kolonial.[19]

Kajian tentang perdagangan kopra di Minahasa pada masa setelah perang kemerdekaan banyak mendapatkan perhatian J.M.J. Pantouw.[20] Perubahan kebudayaan Masyarakat Minahasa tengah menjadi pokok bahasan Bertha Pantouw dalam disertasinya yang dipertahankan dihadapan Senat Guru Besar UI. Dengan mengkaji tulisan-tulisan J.G. Schwarz, ia melihat bahwa masuknya ajaran Protestan Pietis yang dibawakan oleh Schwarz telah menyebabkan terjadinya perubahan budaya di Minahasa dalam kurun waktu antara 1829-1859.[21]

[16]Limadharma Hendra, "Tanam Paksa Kopi dan Moneterisasi Petani Minahasa 1822-1870," (Tesis S2 UI Program Studi Ilmu Sejarah), Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 1987.

[17]Mieke Schouten, *Minahasa Metamorphoses: Leadership and Social Mobility in a South-east Asian Society, c. 1680-1983*, (Disertasi doktor Vrije Universiteit, Amsterdam), Amsterdam: 1993

[18]David E. F. Henley, "Nationalism and Regionalism in a Colonial Context Minahasa in the Dutch East Indies," (Doctoral Thesis, Australian Natioanl University), 1992

[19]David E. F. Henley "Minahasa Mapped: Illustrated Notes on Cartography and History in Minahasa," dalam H. Djohani – Peny – *Focus on Minahasa*, Delft: Nusantara Ethnographic Museum, 1994

[20]J.M.J. Pantouw, "What's a Coconut Worth," (Paper disampaikan dalam Konferensi Perkelapaan yang diselenggarakan di Manado, Januari, 1992)

[21]Bertha Pantouw, "Beberapa Perubahan Kebudayaan di Minahasa Tengah 1829-1859: Suatu Kajian Sejarah Berdasarkan Tulisan-tulisan J.G. Schwarz," (Disertasi doktor bidang Ilmu Sejarah UI), Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 1994

Pemilihan tema tentang pembudidayaan dan perdagangan kopra periode 1870-1942 dengan pertimbangan belum adanya peneliti yang mengkaji masalah ini secara menyeluruh. Kajian-jakian tentang Minahasa seperti yang disebutkan di atas tidak banyak menyinggung tentang periode dan tema yang menjadi pilihan penulis. Sementara itu tulisan-tulisan tentang kelapa di Minahasa juga belum memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan produksi kopra di daerah tersebut sampai akhir pemerintahan kolonial.

Rumusan Masalah dan Kerangka Analisis

Sebelum merumuskan masalah studi ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian yang terkandung dalam produksi kopra di Minahasa. Di daerah ini ada dua kelompok dalam memproduksi kopra. Ada produksi kopra yang dilakukan oleh petani kelapa pribumi, ada pula yang dilakukan oleh *onderneming* atau perkebunan besar yang umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa dan Cina. Karena itu, penulis merasa tidak perlu membedakan antara petani kecil dan *ondernemer* atau pemilik perkebunan besar, seperti yang biasanya dilakukan oleh peneliti lain. Sebagian besar kopra Minahasa diproduksi oleh petani bumi putra, dan hanya sedikit sekali yang diproduksi oleh *ondernemer* baik *ondernemer* Eropa maupun Cina. Tesis ini tidak akan secara khusus membicarakan mengenai perkebunan kelapa yang dilakukan oleh petani pribumi maupun perkebunan besar (Eropa dan Cina) yang dalam teori ekonomi dualisme Boeke dikategorikan ke dalam tipe perekonomian Timur dan perekonomian

Barat,[22] tetapi lebih menitikberatkan pada pembahasan makro dengan melihat produksi kopra yang dapat diekspor ke luar wilayah tersebut.

Lagi pula, menurut Leirissa, kategori dualisme ekonomi seperti yang digambarkan Boeke tidak terjadi di Minahasa. Sistem perdagangan kopra yang menggunakan sistem kontrak merupakan wujud dari aliansi antara sektor ekonomi Barat dan Timur. Dalam sistem kontrak, fungsi pedagang perantara, yang mengumpulkan dan mengadakan kontrak dengan para petani sebagai penghasil kopra, merupakan penghubung antara sektor ekonomi Timur (petani) dan sektor ekonomi Barat (eksportir).[23]

Meskipun demikian, apakah involusi dalam sektor ekonomi Timur (pertanian) seperti yang digambarkan Geertz di Jawa terjadi pula di Minahasa? Menurut Geertz, berdasarkan teori pesimistik Boeke tentang dualisme ekonomi, sektor Timur akan terdesak oleh sektor ekonomi Barat sehingga pada sektor pertanian terjadi involusi akibat pertumbuhan penduduk hanya menumpuk di sektor ekonomi tradisional (Timur) dan tidak terserap ke dalam ekonomi Barat yang modern.[24] Di Minahasa pertumbuhan penduduk yang pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 diikuti dengan perluasan lahan pertanian yang masih sangat luas. Penduduk dari daerah-daerah yang padat penduduknya bermigrasi ke daerah-daerah yang masih sedikit penduduknya untuk membuka lahan pertanian baru. Di samping itu, Minahasa merupakan daerah penghasil tenaga tentara kolonial, atau pegawai-pegawai yang bekerja sebagai kerani pada perusahaan-perusahaan

---

[22]J. H. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1953

[23]Leirissa, *Op. Cit.*

[24]Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1983

swasta Barat atau sebagai juru tulis pada kantor-kantor pemerintah.[25] Hal ini disebabkan hasil pertanian banyak pula yang digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah model Barat sehingga Minahasa merupakan daerah tertinggi melek huruf bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.[26]

Menurut Emmanuel Le Roy Ladurie, ketika *boom* pertanian meningkat, terjadi pertumbuhan penduduk yang pesat dan perluasan sektor pertanian. Tetapi pada tingkat yang paling tinggi terjadi kemunduran yang diikuti dengan munculnya spekulan sebagai rentenir yang kemudian menjadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah-tanah pertanian. Dalam studinya tentang Languedoc Le Roy Ladurie memfokuskan penelitiannya pada apa yang disebutnya siklus besar dalam dunia agraria, yang meliputi kurun waktu antara akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-18 dengan menggunakan pendekatan geografi dan iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, yang disebut dengan istilah *ecohistory*. Pola dasar periode ini adalah suatu pola pertumbuhan sektor pertanian yang luar biasa, yang kemudian diakhiri dengan masa kejatuhan.

Periode dari pertumbuhan ke kejatuhan ini oleh Le Roy Ladurie dibagi dalam dua fase, yaitu fase A dan fase B. Fase A disebut fase ekspansi, terjadi ledakan penduduk yang diikuti dengan perluasan tanah dan naiknya harga untuk biaya sewa dan gaji, serta munculnya semangat *enterpreneur* yang mencapai puncaknya pada abad ke-17. Namun setelah itu, terjadi apa yang disebut dengan fase B. pertumbuhan terhenti dan sebaliknya

---

[25]"Copra in de Minahasa," dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsch Indie*, (21 October, 1932, hal. 630

[26]Barbara Sillars Harvey, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta: Grafiti Press, 1989, hal. 34-35

terjadi kemuduran, dan tekanan penduduk sampai kepada tingkat subsistensi, himpitan hutang dan kelaparan serta terjadinya perpindahan penduduk ke tempat lain dan penundaan usia perkawinan. Masa ini kemudian diikuti dengan munculnya para spekulan.[27]

Bertolak dari pemikiran Ladurie, maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah setelah *boom* kopra mencapai puncaknya di Minahasa mengalami kemandegan dalam sektor pertanian. Bagaimana petani kopra mengatasi masalah tersebut. Apakah *boom* kopra di Minahasa diikuti dengan munculnya *entrepreneur* pada masyarakat tersebut. Sejauh mana peran pemerintah Hindia Belanda dalam perkembangan perdagangan kopra di Minahasa. Bagaimana kopra menjadi andalan utama dalam perekonomian Minahasa, dan bagaimana orang Minahasa mengelola ekonomi kopra yang menjadi andalan utama mata pencahariannya.

Jika membicarakan peran pemerintah dalam perdagangan kopra berarti kita bicara masalah politik ekonomi, dan bila kita membicarakan peranan pedagang perantara yang menghubungkan antara para petani dan para eksportir, penulis menggunakan konsep Van Leur[28] *peddling* atau penjaja. *Peddling* adalah tipe perdagangan kapitalis dengan ciri-ciri tertentu. Perdagangan dilakukan dari tempat ke tempat, dari pulau ke pulau. Dalam konsep perdagangan tersebut, selain penjaja yang membawa barang dagangan dari daerah ke daerah atau dari pulau ke pulau, ada pula para pemilik modal—yang biasanya dipegang oleh para bangsawan. Dalam konteks perdagangan kopra di Minahasa, pemerintah tidak ikut campur. Jual-beli

---

[27]Peter Burke, *History and Social Theory*, Cambridge: Polity Press, 1992, hal. 154-155

[28]J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, Bandung: sumur Bandung, 1960.

kopra dilakukan dengan sistem kontrak antara petani-produsen dan pedagang perantara. Ikut campurnya pemerintah dalam perdagangan kopra baru terjadi setelah terjadi malaise, sebab kalau ekonomi rakyat (kopra) yang hancur itu dibiarkan, akan menjadi masalah bagi ekonomi negara secara makro.

Untuk membatasi ruang lingkup pembicaraan, penulis akan memulai pembicaraannya dari konsep Karl Polanyi. Dalam *Trade and Market in de Early Empires* Polanyi mengatakan bahwa perdagangan adalah pertukaran arus barang dalam perjalanannya lewat pasar. Semua komoditi yang dihasilkan untuk dijual, memiliki potensi sebagai obyek perdagangan. Satu komoditi bergerak ke satu arah, yang lainnya ke arah yang berlawanan. Gerakan tersebut dikendalikan oleh harga. Unsur-unsur utama dalam perdagangan adalah pelaku, barang, dan angkutan.[29]

Dalam konsep perdagangan pasar, perilaku tukar menukarlah yang merupakan sarana integrasi yang menghubungkan mitra dagang yang satu dengan lainnya. Bentuk perdagangan pasar inilah, yang menurut Polanyi merupakan bentuk terpenting dalam perdagangan. Dalam *The Great Transformation,* Polanyi berpendapat bahwa pola perdagangan pasar ini menentukan prinsip ekonomi dalam perilaku barter dan perdagangan. Jika tidak ada pasar, harga tidak dapat diciptakan dengan pola barter. Dalam pasar, prilaku timbal balik antara pembeli dan penjual diatur oleh aturan sentral, yaitu harga.[30]

---

[29]Karl Polanyi, C. M. Arensberg, dan H. W. Pearson, "Ekonomi sebagai Proses Sosial," dalam Hans-Dieter Evers—Peny—*Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Dunia Modern,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hal. 107-137. Menurut Polanyi perdagangan diatur oleh jalur-jalur resmi di bawah kendali pemerintah. Tapi hal ini tidak dikenal di Minahasa, barang kali karena Minahasa tidak mengalami sistem pemerintahan kerajaan yang kuat.

[30]Karl Polanyi, "Perkembangan Ekonomi Pasar," *Ibid.* hal. 138-161.

Meskipun demikian, menurut Polanyi, pertukaran ekonomi dalam dunia perdagangan tidak mutlak terjadi di pasar. Dapat saja pertukaran tersebut terjadi di gedung kantor niaga milik seorang pedagang atau di atas kapal, karena bagaimanapun, hubungan ekonomi seperti itu merupakan [redacted] pasar. *Chaudhuri mendefinisikan sebuah pasar sebagai suatu* [redacted] ekonomi. Pasar juga merupakan pusat proses fisik pertukaran [redacted]u pasar dapat pula dianggap sebagai fenomena sosiologis [redacted]gang dan perantara atau pedagang kecil/keliling dan anggota [redacted] tangga, dan hubungan politik yang mewarnai hubungan antara penguasa setempat dan pedagang.[31]

Menurut Geertz, dalam perdagangan pasar, nilai kompetisi terjadi tidak sesama lembaga yang searah, tetapi lembaga yang berlawanan, yaitu antara penjual dan pembeli.[32]

Struktur perdagangan kopra di Minahasa dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan. Pada tingkat yang paling bawah adalah petani sebagai produsen kopra, yang mengusahakan kopra sebagai industri rumah tangga.[33]

---

[31]K.N. Chaudhuri, *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hal. 223-224.

[32]Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja : Perubahan sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

[33]Industri rumah tangga tani menurut M. Husein Sawit adalah industri yang terutama menghasilkan produksi terutama pangan, sebagian produksinya dimakan sendiri dan sisanya dijual. Tenaga kerja yang digunakan dalam industri rumah tangga tani sebagian berasal dari luar keluarga. (M. Husein Sawit, "Analisis Permintaan Pangan: Bukti empiris Teori Rumah Tangga Pertanian," dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi UI, Vol. XLII, No. 1, 1994, hal. 100); Sensus industri tahun 1974/75 mendefinisikan industri/kerajinan rumah tangga sebagai sistem produksi yang mempekerjakan kurang dari tiga orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. (Peter McCawley, "Pertumbuhan Sektor Industri," dalam Anne Booth dan Peter McCawley—Peny—*Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 79-131). Namun Peter McCawley melihat produksi kopra di Sulawesi Utara sebagai industri rumah tangga meskipun tenaga kerja yang digunakan lebih dari lima orang, sehingga menurut definisi sensus industri yang sama, produksi

Petani produsen mengolah kelapa menjadi kopra dengan menggunakan beberapa orang pekerja yang diambil dari kalangan keluarganya sendiri maupun orang lain yang dibayar.

Pada tingkat kedua adalah pedagang pengumpul atau pedagang perantara. Mereka adalah pembeli kopra dari petani dan kemudian menjualnya kepada para pedagang besar atau eksportir yang kebanyakan berpusat di Manado. Tingkat ketiga adalah pedagang ekspor yang membeli kopra dari para pedagang pengumpul untuk diekspor ke luar negeri atau ke luar Manado.

Sistem pembelian kopra dari petani dilakukan dengan sistem kontrak. Pedagang pengumpul memberikan uang muka kepada petani dengan jaminan sejumlah pikul kopra yang harus disetorkan kepada peminjam pada periode panen tertentu. Bentuk kontrak itu selain dengan jaminan kopra dalam jumlah tertentu, juga sering dapat bentuk sewa kebun untuk jangka waktu tertentu. Sumber keuangan para pedagang pengumpul adalah pedagang besar atau eksportir yang umumnya berpusat di Manado, Amurang, atau Kema. Ketiga tempat itu merupakan pelabuhan-pelabuhan penting di Minahasa yang dapat mengekspor kopra langsung ke berbagai negara.

Sesuai dengan struktur perdagangan, para eksportir memberikan sejumlah uang kepada para pedagang pengumpul. Para pedagang pengumpul itu kemudian meminjamkan uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang muka kepada para produsen dengan jaminan sejumlah pikul kopra atau seluas kebun kelapa tertentu selama jangka waktu tertentu sesuai dengan harga

---

kopra di Minahasa dapat digolongkan ke dalam industri kecil, yaitu industri yang mempekerjakan 5-19 orang. Jenis industri ini antara lain adalah tenun, penggilingan beras, genting, kerupuk, pakaian, batik, batu bata, dan penggergajian kayu.

yang berlaku pada masa panen. Bentuk uang muka tersebut tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang kebutuhan hidup sehari-hari. Para pedagang pengumpul umumnya mempunnyai warung yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Mereka tinggal di kota-kota distrik (kecamatan) atau di kampung-kampung yang tempatnya strategis.[34]

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, penulisan tesis ini meliputi periode antara tahun 1870-an sampai akhir kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (1941/1942). Periode yang ditulis ini oleh banyak ahli sejarah ekonomi Indonesia disebut sebagai periode ekspansi Belanda untuk mengeksploitasi luar Jawa. J. Th. Lindblad membagi periode itu ke dalam tiga fase: pertama disebut sebagai fase pendahuluan, yang dimulai sejak 1870-an sampai desenia pertama abad ke-20. Pada fase itu perusahaan swasta Eropa mulai masuk ke Hindia Belanda. Sistem tanam paksa sudah berakhir. Usaha penanaman tebu tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, tetapi swasta juga diberi kesempatan untuk berperan serta. Di samping itu, perusahaan-perusahaan swasta juga banyak yang mulai menaruh perhatian daerah di luar Jawa sebagai wilayah yang juga tidak kalah menguntungkan. Mula-mula ke Sumatra Timur, kemudian Kalimantan, Sumatra Selatan, Lombok. Sulawesi, dan Maluku.

[34]Tradisi ini sampai sekarang masih berlaku, paling tidak sampai Oktober 1994 ketika penulis mengadakan penelitian lapangan di Minahasa. Menurut seorang pedagang kopra perantara di Kecamatan Tengah, Amurang, uang yang dipinjamkan kepada petani kopra mencapai ratusan juta. Ia mendapatkan uang tersebut tidak dari pinjaman bank tetapi dari perusahaan minyak di Bitung, dengan alasan karena pinjam uang di bank terlalu berbelit-belit. Sekarang umumnya petani mengambil uang muka kepada pedagang kopra untuk bayar sekolah anaknya atau untuk beli barang seperti sepeda motor.

Liem Twan Djie mendefinisikan perdagangan perantara sebagai mata rantai antara perdagangan besar-besaran dan/atau industri di satu pihak dengan perdagangan kecil dan/atau penduduk konsumen/produsen di pihak lain (Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara:Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*, Jakarta: Gramedia-KITLV, 1995, halaman 3).

Fase kedua (1905 sampai sekitar 1825) disebut fase ekspansi. Fase itu ditandai dengan perkembangan yang begitu pesat daerah-daerah luar Jawa dalam dunia perdagangan. Fase itu juga ditandai dengan tiga perubahan besar secara struktural: (1) Perluasan produk-produk ekspor, tidak hanya produk ekspor tradisional seperti gula, kopi, dan tembakau, tetapi juga minyak, karet, dan kopra; (2) Terjadinya emansipasi atas orientasi perdagangan eksklusif terhadap negara induk kolonial *(mother-country)* dan pasar-pasar dari negara-negara lain.. Pasar-pasar di luar Belanda mendapatkan penetrasi langsung dari Hindia Belanda; (3) Adanya pergeseran terhadap ekspor dari Jawa ke luar Jawa.

Total ekspor dari luar Jawa pada periode 1905-1925 naik pesat. Periode itu dapat dibedakan pula ke dalam tiga tahap. Tahap pertama periode antara tahun 1909 dan 1913, ketika nilai ekspor secara keseluruhan naik dari 140 juta gulden menjadi 320 juta gulden, atau naik 125 persen. Tahap kedua adalah tahun 1919/1920 ketika nilai ekspor naik dua kali lipat lebih dari 300 juta gulden menjadi 700 juta gulden. Tahap pertumbuhan ketiga terjadi pada tahun 1925, ketika harga karet luar biasa tingginya.

Fase ketiga merupakan kebalikan dari fase kedua yang akibat trauma pergantian zaman krisis tahun 1930-an.[35] Ketiga fase itu menjadi acuan dalam mengkaji perdagangan kopra di Minahasa dari periode akhir abad ke-19 sampai berakhirnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

---

[35]J. Th. Lindblad, "De Opkomst van de Buiten Gewesten," dalam A.H..P. Clemens & J.Th. Lindblad, *Het Belang van de Buiten Gewesten 1870-1942*, Amesterdam: Neha, 1989, hal. 1-15; tentang tiga perubahan struktural pada fase kedua dapat dilihat pada Lindblad, "De Economic Development of the Indonesian Provinces Out Side Java in Late-and Post Colonial Times," (Paper diskusi Ikatan Sajaran Ekonomi Cabang Jakarta, 1992) hal. 3-4; Tentang ekspansi ekspor perkebunan rakyat di luar Jawa yang begitu cepat setelah 1900, dapat dilihat pula pada Anne Booth, "Export and Grorth in the Colonial Economy," dalam Angus Maddison & Ge Prince (ed.), *Economic Growth In Indonesia 1920-1940*, Dordrecht: Foris Publication-Holland, 1992, hal. 76-77

Orang Minahasa pada mulanya menanam kelapa untuk dimakan, atau sebagai bahan penerangan seperti minyak tanah. Sejak 1880 orang-orang di daerah itu mulai membuat kelapa kering (kopra) karena jenis kelapa kering itu laku dijual pada perusahaan-perusahaan Eropa. Lakunya kopra di pasaran itu membuat orang-orang Minahasa lebih banyak mengembangkan penanaman kelapa untuk dijadikan kopra.[36] Produksi kopra menjadi penting di Minahasa mulai akhir abad ke-19. Sejak tahun 1896 Minahasa dan wilayah Karesidenan Manado lainnya yaitu Gorontalo dan Sangir (sekarang wilayah Propinsi Sulawesi Utara)merupakan pengekspor kopra nomor tiga terbesar setelah Jawa dan Makasar. Perkembangan ekspor kopra ini sangat fluktuatif, tergantung pada permintaan pasar. Meskipun Anne Booth[37] mengatakan bahwa pertumbuhan hasil ekspor tercepat sampai tahun 1913 adalah kopra, dalam kenyatannya pada tahun itu ekspor kopra dari beberapa daerah yaitu Jawa, Makasar, dan Manado mengalami penurunan, kecuali Padang yang sedikit naik. Pada periode selanjutnya, Jawa terus menurun, sedangkan luar Jawa secara umum terus meningkat.

Total produksi kopra dunia pada tahun 1915 mencapai 600.000 ton. Dari jumlah itu, sekitar 25 persennya berasal dari Hindia Belanda.[38] Berarti ada sekitar 150.000 ton kopra yang diekspor Hindia Belanda waktu itu. Jumlah tersebut berasal dari Jawa 63.120 ton, dari Makasar 27.610 ton, dari Manado (Sangir, Manado, dan Gorontalo) 25.000 ton, dan Padang 34.266 ton.[39]

---

[36]Graafland, *Op. Cit.* hal. 11

[37]Anne Booth, *Op. Cit.* halaman 76

[38]F.W.T. Hunger, *Cocos Nucifera: Hanboek voor de Kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten,* Amesterdam: Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1916, hal. 122

[39]*Ibid.* hal. 124

Seperti di tempat-tempat lain, produksi kelapa di Minahasa naik turun. Perkembangan nilai ekspor suatu barang diikuti pula dengan impor barang dari daerah lain. Komoditi impor utama Minahasa adalah beras. Selain itu juga barang-barang kelontong dan tekstil. Perdagangan tekstil di Minahasa didominasi oleh pedagang-pedagang Jepang.[40]

Pada saat harga kopra meninggi, volume perdagangan di Minahasa naik. Sebaliknya, ketika harga kopra turun drastis, volume perdagangan juga menurun. Kenaikan harga kopra mencapai puncaknya pada dasa warsa 1920-an. Pada masa itu petani kopra Minahasa banyak menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya seperti membeli kendaraan bermotor (mobil).[41] Petani memperoleh pinjaman uang dari pedagang perantara dengan jaminan penyerahan kopra setelah masa panen.

Banyak pula petani yang menyewakan kebunnya untuk masa waktu sampai lima tahun atau lebih sebagai pembayaran hutang-hutanngnya. Ketika harga kopra turun, petani tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya beserta bunganya yang umumnya di atas 6 persen setiap masa panen. Keadaan itu berlangsung terus sehingga hutang semakin besar tidak dapat dilunasi meskipun dengan menjual semua produksi kopranya. Keadaan menjadi lebih parah dengan dikenakannya denda yang tinggi bila jumlah penyetoran kurang dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Akibatnya banyak tanah yang diambil alih oleh para kreditor sebagai pembayaran hutang-hutangnya.[42] Pada saat harga kopra tinggi, sistem

---

[40]Economische Weekblade, 21 Oktober 1932, Memorie van Overgave residen Van Aken, 1932.

[41]Christiaan G. Heersink, "Selayar and the Green Gold: The Development of the Coconut Trade on an Indonesian Island (1820-1950)," *Journal of Southeast Asian Studies,* (Vol. 25, No. 1, Maret) 1994, hal. 59

[42]J. H. C. De Groot, "Eenige Beschouwingen over de Copracontractenordonnantie," *Kolonial Studien,* (No. 25), 1941, hal. 97-98

kontrak yang merugikan petani itu tidak begitu merisaukan karena para petani tetap dapat membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya, pada saat harga kopra jatuh, sistem kontrak dalam jual beli kopra sangat membebani petani.

Sebagai komoditi ekspor, harga kopra sangat fluktuatif, tergantung pada permintaan di pasar dunia. Meskipun demikian, selama periode pembahasan tesis ini terjadi dua kali harga kopra jatuh sampai titik yang paling rendah dalam arti di bawah biaya produksi. Pertama adalah pada masa Perang Dunia I dan kedua pada masa malaise sampai pecahnya Perang Dunia II yang berakhir dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang.

Melihat rentannya petani terhadap manipulasi pedagang perantara serta antisipasi jatuhnya harga kopra, pada tahun 1914 sejumlah tokoh masyarakat di Tonsea mendirikan bank perkreditan rakyat yang disebut *Volksbank* Tonsea, atau Bank Rakyat Tonsea.[43]

Pada waktu terjadi krisis kopra kedua, yaitu pada masa malaise (1930) *Minahasaraad* (Dewan Minahasa) mengusulkan pembentukan koperasi pembelian kopra yang dinamakan *Producten Verkoop Centrale* yang ditugaskan untuk membeli semua kopra yang diproduksi oleh petani di Minahasa dengan dukungan keuangan dari *Algemeene Volkscrediet Bank* (AVB).[44]

Untuk mengatasi hutang dari pedagang perantara terhadap para petani pemerintah mengeluarkan peraturan kontrak baru yang tertuang dalam *Copracontrakten Verordening Manado* (Staatsblad 1939 No. 93) yang di dalamnya menentukan persyaratan tertentu kepada para pedagang perantara yang

---

[43]*Perkeboenan Op. Cit.* hal. 11

[44]J. H. C. De Groot, *Op. Cit.* halaman 97-98

melakukan kontrak dengan petani. Sebaliknya, hak pedagang perantara juga mendapatkan perlindungan dalam aturan tersebut[45]

Krisis kopra terjadi lagi pada tahun 1940. Meskipun harga kopra di Manado tergantung pada jauh dekatnya lokasi produksi kopra dengan lokasi penampungan kopra atau pusat-pusat pelabuhan, tinggi dan rendahnya harga kopra di Manado memperlihatkan tendensi yang menurun.

Perang Dunia II pecah pada September 1939, peluang ekspor kopra ke luar negeri bagi Hindia Belanda hilang karena kesulitan transportasi laut. Akibatnya harga kopra turun terus. Jatuhnya Denmark dan Norwegia pada bulan April 1940 kemudian bulan berikutnya Belanda, Belgia, dan Luksember membuat peluang untuk mengekspor kopra hilang, sehingga kopra tidak dapat dijual lagi di pasaran internasional. Akibatnya harga kopra dalam negeri jatuh sampai titik yang paling rendah. Pemerintah Hindia Belanda kemudian kembali memberi bantuan kepada para petani kopra dengan memborong sebagian besar kopra yang tidak laku. Direktur Urusan Ekonomi membentuk semacam badan atau Yayasan Kopra (*Het Copra Fonds*). Melalui lembaga itu kopra diborong pemerintah dengan bantuan finansial dari *Javasche Bank*. Pembentukan Yayasan Kopra ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga kopra. Karena itu Yayasan memegang monopoli dalam perdagangan kopra di Minahasa.[46]

Untuk pengangkutan kopra, pemerintah menggunakan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) sebagai pemegang monopoli. Sebelumnya angkutan dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta yang mengangkut kopra dari pelabuhan-pelabuhan kecil ke pelabuhan besar seperti Pelabuhan

---

[45]*Bestuursmemorie* Resident Menado, van Rhijn, 1941, hal. 98
[46]*Bestuursmemorie, Op. Cit.* hal. 34 dan 100

Manado. Kapal-kapal asing dilarang berlabuh di semua pelabuhan kecuali Makasar yang dijadikan pelabuhan trasit bagi kawasan Timur Besar (Maluku dan Sulawesi). KPM kemudian yang mengangkut kopra dari pelabuhan-pelabuhan kecil di kawasan Timur ke Makasar.[47]

Merosotnya nilai ekspor kopra pada tahun 1939 dan 1941 berpengaruh pada penurunan impor beras. Bahkan pada tahun 1939 pemerintah melarang impor beras dari daerah lain, kecuali padi basah. Penurunan impor beras sebetulnya sudah terjadi sejak 1928. Pada tahun itu impor beras karesidenan Manado turun menjadi 39.000 ton dari tahun sebelumnya 46.000 ton. Pada tahun 1940 impor beras Karesidenan Manado dari daerah lainnya hanya tinggal 14.000 ton.[48]

Pemerintah kemudian menganjurkan penanaman padi dengan membuka ladang-ladang dan tanah persawahan baru. Di Tanah Minahasa saja misalnya dari 10.056 ha sawah pada tahun 1939 menjadi 10.536 ha. Dengan demikian, pada tahun 1940 ada 480 ha tanah persawahan yang baru dicetak. Kemudian untuk ladang pada waktu yang sama dari 25.540 ha menjadi 26.440 ha, atau terjadi perluasan sampai 900 ha.[49]

Pembagian Isi

Tesis ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas kerangka analisis dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bab kedua mendeskripsikan keadaan geografi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Minahasa.

---

[47]J.M.J. Pantouw, *Op. Cit.*, hal. 10

[48]*Ibid*

[49]*Ibid.* Residen Menado pernah melarang impor beras pada tahun 1936. Namun tahun berikutnya impor beras kembali dibuka

Perkembangan budi daya kopra selama kurun waktu periode yang dibahas dalam tesis ini akan dibicarakan pada bab ketiga. Dalam bab ini juga akan terlihat perubahan struktur pertanian pada masyarakat petani Minahasa. Bab keempat membahas masalah perdagangan kopra di Minahasa, yang membicarakan juga sistem perdagangan, struktur perdagangan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perdagangan kopra. Analisis tentang perkembangan perdagangan kopra, termasuk penyatuan ekonomi dalam konteks negara kolonial menjadi kajian bab ini pula. Pada bab ini juga dibicarakan keterlibatan pemerintah dalam pengaturan kontrak-kontrak kopra, dan usaha pemerintah dalam mendirikan bank-bank di Minahasa yang integral dengan sistem perbankan nasional. Bagaimana upaya pemerintah untuk menstabilkan harga kopra melalui sistem monopoli perdagangan kopra dibicarakan pula dalam bab ini. Tesis ini akan ditutup dengan kesimpulan yang akan dipisahkan dalam satu bab sendiri, yaitu bab kelima.

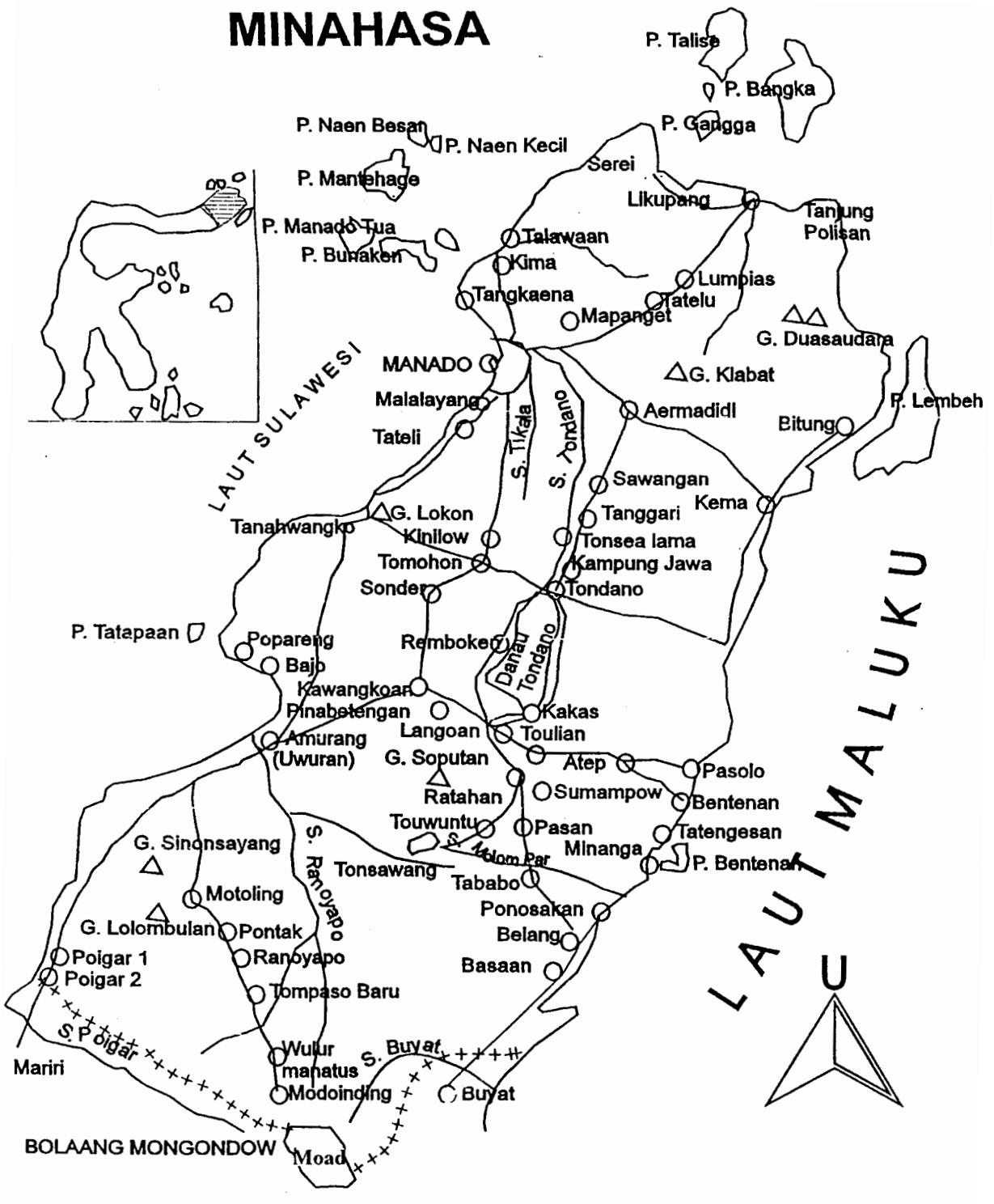
Sumber-sumber yang Digunakan

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pada awal-awal penulisan, digunakan sumber sekunder yang berupa buku-buku referensi atau artikel-artikel tentang Minahasa. Dari sumber-sumber itu dapat ditelusuri sumber primernya. Cara ini lebih mudah daripada langsung mencari sumber primernya. Penggunaan sumber primer akan diusahakan sebanyak mungkin.

Sumber-sumber primer yang digunakan terutama berasal dari paruh kedua abad ke-19 sampai sekitar Perang Dunia II yang dapat diperoleh

dari Arsip Nasional RI. Sumber-sumber yang dapat diperoleh dari Arsip ini antara lain *Memorie van Overgave van het Bestuur van den Residen Manado* J. Tideman, tahun 1926, kemudian dari Residen A.Ph. van Aken tahun 1932. Setelah van Aken, residen yang berkuasa pada tahun 1932-1935 dan 1935-1936. Kemudian pada tahun 1941 Residen M. van Rhijn membuat memori pemerintah (*Bestuursmemorie)* secara lebih lengkap yang ruang lingkupnya meliputi masa-masa 1930-an sampai 1941. *Bestuursmemorie* ini sangat berarti bagi penulisan tesis ini karena banyak pula melaporkan tentang perkembangan kopra di Manado pada masa-masa depresi. Juga digunakan arsip-arsip residensi (arsip daerah) yang meliputi surat menyurat antarpejabat wilayah Karesidenan Manado atau antara Residen Manado dengan pemerintah pusat baik di Batavia maupun di Belanda. Laporan-laporan kolonial merupakan sumber yang digunakan dalam penulisan. Dalam penulisan tesis ini, digunakan pula arsip dari *Algemeen Secretarie.*

Selain itu, digunakan pula sumber-sumber lokal, maksudnya adalah surat kabar lokal yang terbit di wilayah Minahasa pada khususnya atau di wilayah Karesidenan Manado pada umumnya; digunakan pula koran-koran luar Manado sejauh memberitakan masalah Minahasa pada kurun waktu yang menjadi pokok bahasan penulisan ini, meskipun sifatnya hanya insidental.



Sumber: Geraldine Yvonne Jane Manoppo-Watupongoh, "Bahasa Melayu Surat Kabar di Minahasa Abad ke-19" (Disertasi Bidang Ilmu-ilmu Sastra, UI) Jakarta, Fakultas Pascasarjana UI, 1983.

Bab IV
Tiga Fase Perdagangan Kopra dan Sarana Pendukungnya

Tiga Fase Perdagangan Kopra

Produksi kopra memenuhi pasaran bebas sejak akhir abad ke-19, setelah sarjana berkebangsaan Prancis menemukan minyak kelapa sebagai bahan dasar pembuatan margarin dan sabun. Akibat penemuan tersebut, permintaan kopra di pasar dunia menjadi tinggi. Tingginya permintaan kopra ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menggalakkan petani untuk menanam kelapa. Usaha pemerintah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para petani sehingga di mana-mana di Nusantara ditanam pohon kelapa. Fase pertama itu, baru merupakan tahap pengembangan tanaman kelapa. Karena merupakan tanaman keras yang berumur panjang, maka hasil usaha penanaman kelapa itu baru dapat dilihat pada fase kedua, yaitu pada tahun 1915-an. Pada fase kedua ini kebutuhan kopra di pasar dunia begitu tinggi sehingga pemerintah banyak menaruh perhatian terhadap perluasan penanaman pohon kelapa.

Pohon-pohon kelapa itu menjadi penting sehingga pemerintah merasa perlu melakukan sensus khusus untuk menghitung jumlah pohon kelapa di Nusantara ini yang dilaksanakan pada tahun 1917—suatu sensus yang mendahului sensus penduduk yang dianggap akurat yang baru dilaksanakan pada tahun 1930.[1]

[1] *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*, Jakarta: LP3ES, 1993, halaman 397

Pada tahun 1920 Hindia Belanda mensuplai 29 persen kebutuhan kopra dunia. Dari angka itu, lebih dari 1/3 berasal dari Karesidenan Manado. Karesidenan ini menyumbangkan sekitar 10 persen dari seluruh produksi kopra dunia. Dari keseluruhan nilai ekspor Hindia Belanda, antara tahun 1920 sampai 1939 perkebunan kelapa menduduki peringkat kelima dari semua jenis tanaman perdagangan (*landbouwexportgewassen*).[1]

Pembudidayaan kelapa ternyata kemudian menemukan coraknya masing-masing antara Jawa dan luar Jawa. Jika pada fase pertama dan awal fase kedua Jawa mendominasi perdagangan kopra, maka sejak akhir fase kedua, yaitu sejak tahun 1920-an, terjadi perubahan struktur dalam perdagangan kopra. Di Jawa kelapa pada umumnya dibuat minyak goreng. Petani kelapa di Jawa membuat minyak goreng untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selebihnya, kelapa dijual ke pasar secara gelondongan, yang kemudian bermuara pada pabrik-pabrik minyak. Luar Jawa, umumnya memproduksi kelapa untuk dijadikan kopra, untuk diekspor ke luar negeri (*buitenland*).

Karena itu nilai ekspor minyak kelapa di Jawa lebih besar dan cenderung naik dari tahun ke tahun sejak akhir fase kedua dan fase ketiga. Sementara itu luar Jawa lebih banyak mengekspor kopra, yang juga cenderung naik.(Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, lihat tabel 1 dan 2)

---

[1] "Betapa Artinja Kelapa bagi Hindia Belanda", dalam *Pedoman Tani* tahun 1940 halaman 152-154.

Tabel 7

Ekspor Minyak Kelapa Hindia Belanda ke luar negeri (dalam 1000 liter)

Tahun	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Jawa & Madura	7,93	10,39	16,50	9,65	36,62	34,43	16,03	4,43	17,45	8,17
Luar Jawa	0,03	0,01	0,06	0,02	0,04	0,01	0,07	0,43	0,68	1,31
Hind. Beld.	7,96	10,40	16,56	9,67	36,66	34,44	16,10	4,86	18,13	9,48

Sumber: "Mededeeling van het Centraal Kantoor Voor de Statistiek, Afdeelingen Landbouw en Handelsstatistiek", dimuat dalam *Economisch Weekblad*, No. 42, 19 Oktober 1934, halaman 1956.

Tabel 8

Ekspor kopra Hindia Belanda ke luar negeri (dalam 1000 ton)

Tahun	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Jawa & Madura	58,7	29,9	14,1	3,7	47,5	52,9	7,4	3,8	62,7	14,5
Luar Jawa	284,7	321,1	362,8	301,6	393,3	404,0	368,4	356,3	417,2	473,5
Hind. Beld.	343,4	351	376,9	305,3	440,8	456,9	375,8	360,1	479,9	488,5

Sumber: "Mededeeling van het Centraal Kantoor Voor de Statistiek, Afdeelingen Landbouw en Handelsstatistiek", dimuat dalam *Economisch Weekblad*, No. 42, 19 Oktober 1934, halaman 1956.

Dari tabel 8 terlihat adanya kecenderungan menurun eskpor kopra Jawa ke luar negeri, apalagi kalau dibandingkan dengan ekspor kopra Jawa pada tahun 1905 yang mencapai 107,700 ton (dari 159,700 ton untuk seluruh Hindia Belanda), kemudian pada tahun 1910 yang turun menjadi 100,500 ton (dari 169,200 ton untuk seluruh Hindia Belanda), dan tahun 1915 yang menjadi 63,100 ton (dari 150.000 ton untuk seluruh Hindia

Belanda).[3] Turun menjadi 58,700 ton pada tahun 1924 (dari total ekspor Hindia Belanda 343,700 ton), kemudian turun lagi menjadi 14,500 ton (dari total ekspor kopra Hindia Belanda 473,500) pada tahun 1933.

Perkembangan lain adalah bahwa industri kopra banyak didominasi oleh pribumi. Hampir di seluruh wilayah Nusantara, produksi kopra 90% berasal dari kopra pribumi. Bagi petani Minahasa, mereka tertarik memproduksi kopra karena: (1) Adanya permintaan yang tinggi di pasar dunia; (2) pengelolaannya tidak repot; (3) tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Tabel 9 menunjukkan perbandingan produksi kopra rakyat/pribumi dan nonpribumi swasta, sedangkan grafik 1 menggambarkan pertumbuhan produksi kopra rakyat Jawa dan luar Jawa.

Tabel 9

Produksi kopra rakyat (pribumi) dan swasta (non pribumi)

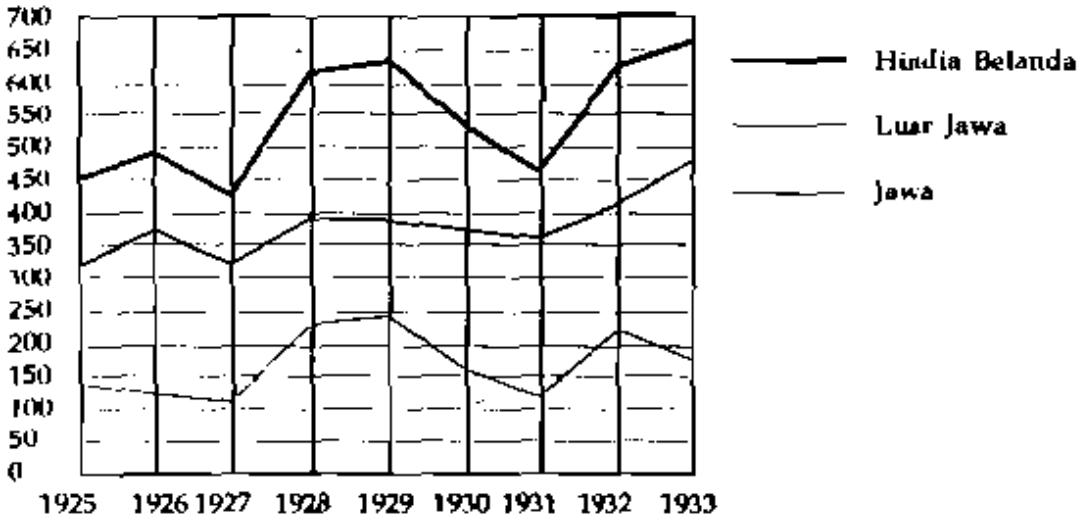
Tahun	Jawa/Madura		luar Jawa		Hindia Belanda		Total	Persentase	
	swasta	rakyat	swasta	rakyat	swasta	rakyat		swasta	rakyat
1925	3	136	14	317	17	453	470	3,6	96,4
1926	2	131	16	365	18	496	514	3,5	96,5
1927	2	107	16	310	18	417	435	4,1	95,9
1928	3	223	20	395	23	618	631	3,6	96,4
1929	4	241	20	397	74	638	662	3,8	96,2
1930	3	154	22	374	25	528	553	4,5	95,5
1931	3	138	21	360	24	458	482	4,9	95,1
1932	4	223	23	406	27	620	657	4,3	95,7
1933	3	189	27	470	30	659	681	4,4	95,6

Sumber: "Mededeeling van het Centraal Kantoor Voor de Statistiek, Afdeelingen Landbouw en Handelsstatistiek", dimuat dalam *Economisch Weekblad*, No. 42, 19 Oktober 1934, halaman 1654.

[3] F.W.T. Hunger, *Cocos Nucifera: Handboek voor de Kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten*, Amesterdam: Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1916, halaman 124

Grafik 1

Pertumbuhan produksi kopra rakyat di seluruh Hindia Belanda, Jawa dan luar Jawa tahun 1925 sampai 1933 (dalam 1000 ton).



Sumber: *"Economisch Weekblad,* No. 42, 19 Oktober 1934, halaman 1654.

Rendahnya perkembangan produksi kopra di Jawa bila dibandingkan dengan luar Jawa, selain perluasan penanaman kelapa di Jawa pada awal-awal abad 20 itu tidak begitu mendapatkan prioritas pemerintah, juga karena pembuatan kopra di Jawa kurang menarik bagi petani kelapa. Di Jawa pada periode tersebut sudah tidak banyak orang yang memiliki tanah yang luas seperti di luar Jawa. Penanaman kelapa bagi petani Jawa bukan merupakan tanaman utama tetapi merupakan sambilan, yang ditanaman di sekitar rumah, atau di pekarangan-pekarangan yang tidak digunakan untuk penanaman padi. Karena itu, penanaman kelapa dimaksudkan hanya untuk kebutuhan sendiri, yaitu dibuat minyak kelapa atau gula kelapa yang terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga sendiri. Petani kelapa di Jawa juga lebih banyak menjual kelapa gelondongan ke pasar. Dari sinilah kemudian ditampung oleh pabrik-pabrik minyak kelapa.

Itulah sebabnya maka ekspor minyak kelapa dari Jawa lebih banyak bila dibandingkan dengan luar Jawa. Pada tahun 1924 ekspor minyak kelapa dari Jawa mencapai 7,93 juta liter sementara itu luar Jawa hanya 0,03 juta liter. Lima tahun kemudian atau memasuki fase ketiga (1929) ekspor minyak kelapa dari Jawa naik menjadi 34,43 juta liter, sedangkan luar Jawa turun menjadi 0,01 juta liter. Tahun 1933 ekspor minyak kelapa Jawa mengalami penurunan menjadi 8,17 juta liter, berbeda dengan luar Jawa yang naik menjadi 1,31.[5]

Penurunan ekspor minyak kelapa di Jawa pada tahun tersebut dapat diperkirakan karena lemahnya daya beli pasar yang disebabkan oleh depresi, sedangkan kenaikan ekspor minyak kelapa dari luar Jawa disebabkan oleh turunnya harga kopra sehingga petani kelapa mulai mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Untuk Minahasa sendiri, naiknya produksi minyak kelapa pada tahun 1930-an disebabkan kebutuhan pasar yang meningkat akibat munculnya industri sabun suci di daerah itu pada periode tersebut.

Selain ekspor ke luar negeri, lalu lintas produk ini antardaerah dalam negeri—terutama dari luar Jawa ke Jawa—juga penting dalam dunia perdagangan. Tabel 10 menggambarkan ekspor kopra dari luar Jawa ke Jawa.

---

[5] *Ibid*

Tabel 10

Ekspor kopra luar Jawa ke Jawa (dalam 1000 kg)

	1928	1929	1930
1. Bali dan Lombok	4.343	5.979	10.372
2. Bangka	187	288	228
3. Bengkulu	856	1.056	849
4. Bilington	959	979	1.181
5. Distrik Lampung	1.247	1.312	1.088
6. Makasar	3.777	2.367	10.805
7. Manado	13.057	4.150	147
8. Sumatra Barat	1	10	-
9. Kalimantan Barat	901	2	17

Sumber: Departement van Landbouw, Nijverheiden Handel, Afdeeling Handel--Buitenzorg, Verslag omtrent Handel en Nijverheid van Nederlandsch-India, 1930, halaman 260.

Ekspor luar Jawa ke Jawa tahun 1928 sampai 1930 di beberapa daerah menunjukkan kecenderungan naik, kecuali Manado dan Kalimantan Barat. Turunnya angka ekspor Manado ke Jawa yang sangat drastis pada tahun 1930-an karena pada tahun-tahun itu di Manado berkembang insdustri sabun dan minyak kelapa lokal sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Sampai tahun 1920 atau fase kedua kopra Minahasa banyak pula yang diekspor ke Makasar karena di daerah yang disebut

terakhir itu terdapat dua pabrik minyak besar milik perusahaan Eropa, yaitu Insulinde dan Jurgens.[5]

Naikturunnya ekspor kopra luar Jawa sangat tergantung pada kebutuhan pasar dunia. Demikian pula naik turunnya ekspor minyak kelapa Jawa dan Madura, meskipun sebagian besar produksi minyak kelapa Jawa dan Madura digunakan untuk kebutuhan lokal. Tabel 7 menunjukkan bahwa ekspor minyak kelapa luar Jawa pada tahun 1933 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan meningkatnya kebutuhan minyak kelapa di kawasan tersebut akibat produksi sabun lokal. Sebagai contoh konkret, hal itu dapat dilihat dari munculnya industri sabun cuci di Minahasa yang telah menyebabkan naiknya produksi minyak kelapa di wilayah itu.

Konsumen kopra pada awal abad ke-20 itu sampai tahun 1915 atau fase pertama dan kedua adalah Prancis, yang mengimpor hampir separuh produk kopra dunia. Sebagian besar masyarakat Prancis mengkonsumsi kopra untuk kebutuhan industri rumah tangga (*eigen industrie*). Konsumen kopra terbesar kedua adalah Jerman. Sementara itu Belanda yang merupakan pedagang kopra dan mempunyai banyak pabrik margarin baru mulai menjadi pengimpor kopra yang diperhitungkan setelah tahun 1915-an dan menjadi peringkat ketiga negara pengimpor kopra sejak tahun 1920-an. Peringkat selanjutnya adalah Rusia, sedangkan Denmark dan Belgia hanya mempunyai kepentingan yang kecil terhadap kopra. Demikian pula Inggris

---

[5]J. Broeder, "Copra in de Minahasa V" dalam *Economische Weekblad*, 28 Oktober 1932, halaman 811

dan Amerika Serikat meskipun kedua negara itu merupakan pengimpor utama minyak kelapa Hindia Belanda.[6]

Tingginya kebutuhan kelapa (baik untuk margarin maupun gemuk) menyebabkan harga kopra terus meningkat. Puncak bom kopra setelah Perang Dunia I adalah pada tahun-tahun pertengahan 1920-an atau fase kedua. Untuk Manado, pesatnya budi daya kopra di wilayah itu telah menyebabkan banyaknya perusahaan perdagangan asing yang membuka cabangnya di sekitar kota-kota pelabuhan Manado. Di wilayah Minahasa saja pada tahun 1920-an ada sekitar 10 sampai 12 perusahaan dagang asing. Sebagian besar adalah perusahaan milik Belanda seperti Borsumij, Bouvy Gebroeders, Correlje & Co, Dirks & Co, Ledeboer & Co, dan Morhmann & Co. Pada tahun 1921 Denmark juga membuka perusahaannya di Manado yang dikenal dengan nama Manado Produce Company (MPC). Amerika Serikat tidak ketinggalan. Pada tahun 1927 sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bernama Vegetable Oil Company mulai mengekspor kopra dari Manado ke Pantai Barat Amerika Serikat terutama ke Los Angeles. Pada tahun 1930-an atau memasuki fase ketiga perusahaan Jepang juga mulai dioperasikan di Manado dalam perdagangan kopra.[7] Padahal sebelumnya perusahaan Jepang di Manado bergerak dalam bidang tekstil.

---

[6] *Ibid.* halaman 122; Amerika Serikat mengimpor minyak kelapa dari Hindia Belanda lebih banyak daripada kopra. Pada tahun 1917 ekspor minyak kelapa Hindia Belanda mencapai 30.665.226 liter. Dari jumlah itu, 24.630.576 diekspor ke Amerika Serikat karena tingginya kebutuhan gemuk di negara itu. (H.R. Roelfsema, *De Kokos-Kultuur*, Haarlem: N.V. Tjeenk Willing & Zoon, 1929, halaman 94)

[7] R.Z. Leirissa, Copracontracten: An Indication of Economic Development in Minahasa During the Late Colonial Period", (Makalah dipresentasikan pada Academi Colloquium Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s - 1990s yang diselenggarakan oleh Koninklijke Nederlandsch Academie van Wetenschappen, Amesterdam, 20-22 September 1994. Dalam papernya yang berjudul, Caracteristic of Japanese Entrepreneurship in the Prewar Indonesian Economy" yang diajukan dalam Seminar yang sama, Peter Post menunjukkan adanya tiga perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang kopra di Manado pada tahun 1925, masing-masing Cult. Mij. Kelelondey, Nanyo Boeki K.K., dan Y. Katsuma).

Pada tahun 1927 Minahasa mengekspor 7.600 ton kopra ke Amerika Serikat. Pada tahun 1929 Amerika Serikat masih mengimpor 5.100 ton. Tahun berikutnya, pelabuhan Manado mengirim 5.200 ton kopra ke Amerika Serikat, tahun 1931, 7.600 ton, dan 1932 (September) 28.000 ton. Banyaknya kopra yang diekspor ke Amerika Serika, antara lain karena para pedagang lebih suka menjual kopranya kepada perusahaan Amerika yang berani membeli lebih tinggi daripada pedagang Eropa.[8]

Bersamaan dengan terus melajunya produksi kopra dunia dan tingginya harga kopra, muncul pula di pasaran dunia jenis-jenis minyak yang bahan dasarnya bukan dari kopra, melainkan dari ikan penyu, lemak babi, biji kapas, manpun kacang-kacangan. Munculnya jenis-jenis minyak selain kopra tersebut menyebabkan terjadinnya over produksi jenis minyak ini yang diikuti dengan menurunnya harga kopra di pasar dunia terutama pada masa-masa *malase* atau fase ketiga. Meskipun demikian, dalam surat rahasia Direktur Urusan Ekonomi G.H.C. Hart kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 29 Juni 1935 No. 63/A.H. digambarkannya rasa optimisnya bahwa jatuhnya harga kopra dan juga minyak kelapa di pasaran ini hanya bersifat sementara karena pertumbuhan kedua produk ini dianggapnya mempunyai prospek yang cukup menguntungkan.

---

[8] J. Broeder, *Op. Cit.* halaman 812. Perusahaan Amerika Berani membeli kopra lebih tinggi sekitar 50 sen per pikul daripada perusahaan Eropa. Hal ini karena kopra dari Manado dapat dikirim langsung ke Pantai Pasifik, sedangkan perusahaan lain harus mengangkut kopranya dengan perusahaan pelayaran yang tergabung Batavia Vrachten Conferentie, yang harus mengangkut kopra dari pelabuhan-pelabuhan kecil di belahan Timur Indonesia ke Makasar dulu, schingga biaya angkutan akan lebih mahal, di samping, terjadi pula penyusutan kopra. Menurut Hart, ekspor kopra Manado ke Amerika waktu itu bahkan mencapai 40.000 sampai 50.000 ton, dikapalkan dengan kapal-kapal Java-Pacific Lijn (S.M. Nederland en Rotterdamse Lloyd) Kerr SS.Coy (Silver Line), Klaveness Line, dan Dolar Line. Pengapalan sistem ini dianggap Hart telah merugikan KPM. (Laporan Direktur KPM, Pronk yang dikutip Hart, dalam Hart, *Op. Cit.* halaman 61

Diakuinya bahwa tekanan berat yang menimpa pasaran minyak dan lemak (gemuk) ini disebabkan oleh kelebihan produksi minyak ikan paus dan minyak dari biji kapas, serta minyak dari kacang-kacangan asal Afrika. Jenis-jenis minyak ini pada tahun-tahun *malaise* atau memasuki fase ketiga memang tersedia cukup banyak di Eropa dan Amerika Serikat yang jumlahnya secara keseluruhan mencapai ratusan ribu ton lebih. Pada tahun 1934 di Amerika Serikat kekurangan produksi di hampir seluruh produk pertanian kecuali jenis tanaman yang mengandung minyak dan makanan binatang sehingga jenis tanaman ini dimanfaatkan untuk mencukupi persediaan konsumsi.[9] Karena itulah pada tahun-tahun tersebut Kopra dari Minahasa tidak lagi laku dikirim ke Amerika Serikat, meskipun pada tahun 1933 negara itu masih mengimpor kopra dari luar Jawa, terutama dari Manado sekitar 28.000 ton.[10]

Di Eropa pada musim semi 1935 terjadi penjualan sisa persediaan minyak ikan terutama ke Jerman. Sementara itu di Amerika Serikat sejak 1931 sejumlah besar minyak biji kapas telah dibeli dalam waktu yang tidak begitu lama oleh pabrik penggilingan gula. Pada tahun 1935 persediaan minyak biji katun mencapai 93.770.000 lbs dan menjadi 145.129.000 lbs pada tahun berikutnya. Sementara itu kebutuhan minyak gemuk pada tahun 1935 sebesar 553.530.000 lbs dan pada tahun berikutnya menjadi

---

[9]Surat Direktur Urusan Ekonomi G.H.C. Hart kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 Desember 1935, dalam arsip Binenlandsch-Bestuur (BB) 116, Geheim, ANRI, halaman 7-8. Pada tahun 1934 pemerintah Amerika telah memutuskan harga impor kopra yang tidak memungkinkan bagi eksportir kopra di Manado untuk memasukkan kopra ke Negara ini. (Memorie van Overgave Asisten Resident Manado, A. Stuurman, 10 Juli 1936, halaman 98). Bahkan dalam kenyataannya, Amerika sebenarnya sudah menarik diri sebagai pasaran kopra sejak Juni 1933 (J.H.R. Broeder, "Overzicht van de Handelsbeweging van Manado over het 2de Kwartaal 1933", *Economisch Weekblad*, 15 September 1933, halaman 446)

[10]*Verslag omtrent Handel* 1930 *Op. Cit.* halaman 158

841.138.800 lbs.[11] Di Norwegia penangkapan ikan paus untuk dijadikan minyak sudah mulai dibatasi. Bahkan pada tanggal 10 Juni 1935 pemerintah negeri itu mengeluarkan larangan penangkapan ikan paus untuk melindungi ikan itu dari kepunahan. Akibat peraturan tersebut produksi minyak ikan paus tidak akan lagi sebanyak seperti tahun-tahun 1934/1935 yang mencapai 400.000 ton.

Kenyataan tersebut yang kemudian dijadikan alasan Direktur Urusan Ekonomi G.H.C. Hart untuk mengatakan bahwa jatuhnya harga minyak kelapa dan kopra hanya bersifat sementara. Menurut Hart, kemungkinan besar Hindia Belanda dapat menjual minyaknya kembali ke Amerika Serikat setelah tahun 1937, yaitu setelah produksi minyak (gemuk) non kelapa mencapai puncaknya. Di Jerman, produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak gemuk hanya 41 persen. Selebihnya, yaitu 59 persen harus diimpor dari negara lain.[12] Pemerintah Jerman memang sudah berupaya meningkatkan produksi lemak negaranya dengan meningkatkan pengembangan peternakan dan memperluas tanaman yang mengandung lemak, tetapi usaha itu masih kurang memberikan arti yang cukup. Faktor utamanya adalah sedikitnya lahan yang belum diolah untuk perluasan budidaya tanaman yang mengandung minyak tersebut.[13] Meskipun demikian, sejak tahun 1928 ekspor kopra ke Jerman terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Impor kopra dari Jawa misalnya, dari 15.000 ton pada tahun 1928 turun menjadi 1000 ton pada tahun 1930 dan dari luar Jawa pada periode yang sama dari 81.000 ton menjadi 43.000 ton.[14] Hal lain yang menyebabkan lemahnya pemasaran kopra pada

[11] *Hart, Op. Cit.*
[12] *Ibid*
[13] *Ibid.* halaman 17
[14] *Versiag omtrent Handel...Op.Cit.* halaman 258

periode ini adalah karena beberapa negara di Eropa dan juga Amerika Serikat memproteksi produksi gemuk negaranya sehingga produk gemuk dari negara lain tidak dapat masuk.

Negara yang tetap menjadi pengimpor kopra terpenting Hindia Belanda adalah Denmark. Sampai tahun 1935 negara itu masih mempunyai devisa yang cukup untuk mengimpor bahan lemak (gemuk) sehingga ekspor kopra ke Denmark dapat terus berlangsung tanpa rintangan. Hasil industri minyak Denmark setengahnya dikirim ke luar negeri, sisanya digunakan untuk kebutuhan pembuatan mentega. Karena itu Denmark sebagai negara pengekspor mentega tidak tergantung pada pasaran margarin di luar negeri. Perkembangan konsumsi margarin di Denmark sebagian besar tergantung pada kemungkinan penjualan mentega Denmark ke luar negeri, terutama Inggris.

Bagi Hindia Belanda situasi yang telah disebutkan itu mempunyai arti yang cukup besar. Ekspor tahun 1934 yang jumlahnya mencapai f 485.770.000 berasal dari kopra dan minyak kelapa yang masing-masing menduduki peringkat ke 10 dan ke 13 dengan nilai sebesar f 16.860.000 dan f 8.717.000. Dari jumlah itu, Sulawesi dan Maluku menduduki tempat yang penting. Bagi Hindia Belanda secara keseluruhan, kedua jenis produk tersebut merupakan sumber pendapatan yang penting dan berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduk pribumi karena merupakan produk dari industri rumah tangga.[15] Karena itu turunnya harga kopra dan minyak goreng pada awal tahun 1930-an ini mempengaruhi kehidupan para petani kelapa,

[15] *Ibid.* halaman 30. Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Hindia Belanda, tetapi juga di negara-negara lain penghasil kopra seperti Philipina, dan Meksiko. Sedangkan Jepang sebagai negara Asia pengimpor kopra yang penting pada periode *ini* sudah tidak lagi menjadi pembeli yang tetap (*Memorie van Overgave* Asisten Residen Menado, Stuurman, 1936.)

meskipun tidak separah yang dialami oleh para pedagang kopra termasuk para eksportir kopra.

Hal itu disebabkan adanya biaya-biaya produksi dalam perusahaan rumah tangga pribumi yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep ekonomi Barat.[16] Ada faktor-faktor tenaga kerja rumah tangga yang tidak diperhitungkan dengan ongkos produksi. Di samping itu, ada strategi yang digunakan petani untuk tidak mengeluarkan biaya produksi. Jika pada saat harga kopra tinggi para pekerja yang diambil di luar keluarga dibayar dengan sistem pembayaran harian atau per jenis pekerjaan secara tunai, maka pada saat harga kopra jatuh para pekerja dibayar dengan sistem bagi hasil. Untuk Wilayah Minahasa, pembagian yang paling populer adalah: untuk petani dan pekerja masing-masing 40 persen. Sisanya yang 20 persen digunakan untuk biaya angkutan (gerobag) yang sebetulnya milik petani sendiri sehingga sebenarnya petani mendapat bagian 60 persen sedangkan pekerja 40 persen.[17] Sementara itu di Jawa, turunnya harga kopra telah menyebabkan banyaknya petani kelapa, terutama yang jauh dari pasar, tidak menjual kelapanya ke pasar, tetapi mengolahnya menjadi minyak kelapa untuk kepentingan rumah tangganya sendiri. Hal ini juga merupakan salah satu sebab jatuhnya harga minyak kelapa yang diproduksi oleh pabrik-pabrik minyak milik orang-orang Cina.[18]

Cara lain untuk menghadapi krisis bagi petani adalah mulai mengintensifkan kembali penanaman padi. Ini dapat dilihat dari menurunnya impor beras yang sangat drastis. Jika pada tahun 1929 Manado mengimpor

---

[16] *Ibid.*

[17] Pernyataan ini dikemukakan oleh beberapa petani kelapa di daerah Amurang dan Tenga yang sempat penulis hubungi pada Oktober 1994. Bahkan cara-cara seperti ini dilakukan pula oleh para petani cengkih pada saat ini.

[18] *Verslah omtrent Handel ...Op. Cit.* halaman 260

beras 29.000 ton, tahun berikutnya hanya mengimpor 24.000 ton. Untuk perluasan areal penanaman padi, diperluas areal saluran irigasi, sehingga di samping memungkinkan perluasan tanah untuk penanaman padi, dengan dikembangkan saluran irigasi yang baik, memungkinkan untuk penanaman padi dua kali setahun. Perluasan persawahan tampak, misalnya, pada tahun 1939 ada 10.056 ha sawah yang diairi dengan sistem irigasi menjadi sekitar 10.536 ha. pada tahun 1940. Dengan demikian, antara tahun 1939 - 1940 terdapat 520 ha tanah persawahan yang baru dicetak untuk penanaman padi. Sedangkan untuk ladang pada waktu yang sama terjadi pula perluasan dari 25.540 ha menjadi 26.440, atau terjadi perluasan sampai 2.900 ha.[19] Keberhasilan perluasan penanaman padi dapat mengurangi impor beras dari daerah lain. Pada tahun 1940 seluruh karesidenan Manado hanya mengimpor beras 14.000 ton. Padahal pada tahun 1927 daerah ini mengimpor 46.000 ton beras, terutama dari Jawa.[20]

Dalam masa krisis pada fase ketiga ini terjadi pula migrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti di Manado dan Tonsea ke daerah Minahasa bagian selatan sampai ke Bolaang Mongondow karena di daerah ini masih banyak lahan untuk perluasan pertanian.[21]

Ramalan Hart bahwa jatuhnya harga kopra hanya bersifat sementara ternyata tidak menjadi kenyataan. Memang, sebagaimana dilaporkan Stuurman, harga kopra pada tahun 1935 sedikit mengalami peningkatan menjadi sekitar f 3,00 per pikul bila dibandingkan dengan tahun 1934 yang hanya sekitar f 2,00. Bahkan pada awal tahun 1936 (Januari-Februari)

---

[19] Bestuurmemorie van Rijn, *Op. Cit.* halaman 35. Mieke Schouten, *Minahasan Metamorphoses*, Amsterdam: Vrij Universiteit, 1993, halaman 169

[20] *Van Rijn, Ibid.* halaman 34

[21] *Memorie van Overgave Resident Menado*, van Aken, 1932, Kaoem Moeda, 6 Januari 1931

mencapai antara f 4,00 - f 4,50. Tetapi kemudian turun lagi pada bulan April-Mei tahun yang sama menjadi sekitar f 3,30.[22] Seterusnya, harga tersebut cenderung turun sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 11.

Tabel 11

Harga Kopra di Minahasa tahun 1936 - 1940 (dalam 100 kg.)

Bulan	1936	1937	1938	1939	1940
Januari	f 6,40	f 13,35	f 4,90	f 3,55	f 3,37
Februari	f 5,24	f 10,70	f 4,30	f 4,42	f 3,53
Maret	f 5,20	f 10,10	f 4,30	f 4,50	f 3,80
April	f 4,88	f 7,70	f 4,25	f 4,30	f 2,91
Mei	f 4,76	f 6,70	f 4,30	f 4,65	f 2,08
Juni	f 5,84	f 6,80	f 3,50	f 4,65	f 2,03
Juli	f 5,36	f 7,20	f 3,60	f 4,35	f 1,80
Agustus	f 6,20	f 6,25	f 3,77	f 4,00	f 1,55
September	f 7,52	f 6,70	f 3,60	f 3,05	f 1,53
Oktober	f 7,52	f 6,25	f 3,10	f 3,70	f 1,65
Nopermber	f 11,20	f 4,95	f 3,25	f 4,15	f 1,60
Desember	f 12,00	f 4,95	f 3,55	f 3,85	f 1,64

Sumber: Bestuurmemorie Residen Manado M. van Kijn, Mei 1941, halaman 35. Jika dihitung per pikul seperti standar hitungan berat sebagaimana umumnya penghitungan berat kopra di wilayah ini, maka angka tersebut akan lebih kecil karena satu pikul sama dengan 60 kg.

Tabel di atas menunjukkan kecenderungan harga kopra yang terus menurun, meskipun perubahan harga setiap bulannya sangat fluktuatif. Pada tahun 1940 terjadi penurunan yang paling rendah setelah sedikit mengalami kenaikkan pada tahun-tahun sebelumnya. Naik turunnya harga kopra ini sangat ditentukan oleh perkembangan permintaan minyak (kelapa) dan gemuk di pasaran. Pada bulan September 1939 peluang ekspot kopra

[22]Stuurman, *Op. Cit.*

Hindia Belanda ke luar negeri hilang karena blokade akibat perang. Jatuhnya Denmark dan Norwegia pada bulan April 1940 kemudian diperburuk lagi dengan jatuhnya Belanda, Belgia, dan Luxember pada bulan berikutnya menyebabkan harga kopra jatuh sampai titik yang paling rendah.

Bagi Minahasa dan beberapa daerah kelapa lainnya, diusulkan agar ada pemusatan pembelian kopra oleh pemerintah dengan harga standar sehingga didapatkan stabilitas harga yang standar. Usaha tersebut, dimulai dengan pembebasan hutang-hutang para petani kopra dari para pedagang perantara, selanjutnya pada industri margarin Belanda diwajibkan untuk paling sedikit 60 persen menggunakan bahan bakunya dari Hindia Belanda. Cara ini diharapkan dapat memberikan suatu penjualan yang tetap tanpa mempengaruhi harga.

Pada September 1939 lonjakan permintaan kopra secara besar karena Belanda memerlukan kopra dengan jumlah besar, Departemen Perdagangan Belanda sendiri yang mengatur pembeliannya. Setelah September 1939 Voedingsmiddelenfonds membeli sejumlah besar kopra. Pada waktu itu harga kopra menjadi baik karena Amerika Serikat mendadak masuk ke pasar kopra. Telapi tidak lama kemudian permintaan menjadi lebih kecil dari penawaran sehingga harga kopra kembali turun.

Keadaan ini menjadi lebih parah ketika sebagian besar Eropa Barat diduduki Jerman dan akhirnya Belanda, Belgia, Prancis, jatuh sehingga penjualan kopra ke nagara-negara tersebut tidak memungkinkan lagi. Karena itu, pemerintah sekali lagi, memberikan jaminan kestabilan harga dengan memberikan bantuan pembelian kopra. Memang, sebagaimana dijelaskan dalam Memorie van Toelichting, dari jenis perkebunan yang

lain seperti jagung dan padi, orang-orang Minahasa sebenarnya sudah dapat hidup untuk hanya sekadar makan. Tetapi mereka hidup bukan sekadar makau. Mereka memerlukan uang untuk membeli keperluan lain. Selama ini keperluan tersebut dapat ditutupi dengan penjualan kopra, yang setelah terjadi malaise harga kopra sudah tidak dapat diharapkan. Keadaau ini, menurut Memorie van Toelichting, dapat ditolong jika pemerintah membeli kopra yang sudah tidak ada pembelinya lagi karena harganya yaug rendah, atau memberi sokongan uang.[23]

Pemerintah menyetujui untuk memenuhi bantuan yang diminta. Pemikiran pokok yang muncul waktu itu adalah, bagaimaua melakukan pembelian kopra dengan harga sedemikian rupa sehingga alat produksi dan perdagangan tetap berdiri, serta kejatuhan ekonomi negara dapat dicegah. Uutuk itu, dan karena kopra dapat disimpan lama, pemeriutah akan mensubsidi dengan memborong semua kopra yang diproduksi penduduk saat harga kopra jatuh dan tidak laku dijual dengan harga standar. Kopra tersebut akan ditimbun dan akan dijual kembali saat harga kopra kembali normal. Keuntungan yaug diperoleh dari penimbunan itu diperuntukkau bagi daerah-daerah yang perlu dibantu. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mendirikan Het Coprafond yang kemudian dikenal dengan Yayasan Kopra, sebuah lembaga yang bertugas memborong dau menimbuu kopra dari para petani sehingga harga kopra dapat dikendalikan. Keuangan Yayasan Copra didukung oleh Javasche Bank.

---

[23] *De Bergcultures*, N0. 36, yang dimuat kembali dalam *Pedoman Tani*, tahun 1940, halaman 120-125

Sistem Jual-Beli dan Sarana Pendukungnya

Satu ciri yang khas dalam transaksi perdagangan kopra di Minahasa (dan Manado secara umum) adalah tidak adanya pasar secara fisik seperti dalam pengertian tradisional.[24] Transaksi jual beli dilakukan melalui sistem kontrak antara produsen dan pembeli. Produsen meminjam sejumlah uang dari pembeli sebagai uang muka, dengan jaminan sejumlah pikul kopra yang harus diserahkan kepada pembeli yang biasanya disebut pedagang perantara atau dengan istilah sekarang pedagang pengumpul untuk kurun waktu tertentu. Sistem perdagangan semacam ini dikenal dengan sistem kontrak.

Sistem jual beli semacam ini merupakan tradisi yang sudah cukup lama berlaku di Minahasa. Sumber-sumber mengenai Minahasa banyak memberikan gambaran tentang sistem perskot atau panjar dalam jual beli hasil perkebunan. Hal itu juga terjadi pada penjualan pala, cengkih, atau coklat kira-kira pada tahun 1850-an. Pada awal sistem ini dikenal, pemilik kredit (debitur) masih mempunyai wewenang mengatur hasil panennya sendiri. Karena itu banyak pemilik kebun yang tidak menyerahkan semua hasil panennya kepada pemberi kredit. Untuk mengatasi masalah itu, pemberi kredit membuat aturan untuk dapat mengurus kebun yang telah diberinya uang muka itu.[25] Sistem uang muka ini berkembang dengan cepat dalam sistem perdagangan kopra.

---

[24] Pasar dalam pengertian tradisional diartikan sebagai tempat berkumpulnya produsen atau penjual dengan pembeli. Di situlah harga kemudian tercipta melalui tawar menawar. (*Encyclopadia of Social Science*). New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972, halaman 575-580. Di pasar inilah kompetisi terjadi, bukan antara lembaga yang searah tetapi antara lembaga yang berlawanan, yaitu antara pembeli dan penjual (Clifford Geertz, *Penjaja dan Raja): Perubahan sosial dan modernisasi ekonomi di dua kota di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1989 halaman 9-10.

[25] Broeder, "Copra in Minahasa," *Economiech Weekblad*, 21 Oktober 1932

Sejak perdagangan kopra mulai ramai di pasaran pada akhir abad ke-19 atau fase pertama, pembelian kopra dengan sistem panjar sudah berlaku dan semakin ramai setelah Perang Dunia I atau fase kedua ketika harga kopra naik mencapai f 12,50 sampai f 15,- per pikul. Pada saat ini tidak hanya produsen yang berpendapatan tinggi, tetapi pedagang perantara juga dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya. Karena itu, tidak heran jika terjadi persaingan sengit antara para pedagang perantara dalam usahanya mendapatkan kopra sebanyak-banyaknya. Makin banyak kopra yang berhasil dikumpulkan, makin besar keuntungan yang diraupnya.

Untuk mendapatkan kopra dalam jumlah besar, maka para pedagang harus mengikat para petani/produsen supaya tidak menjual kopranya kepada orang lain. Cara mengikatnya adalah dengan memberikan uang muka sebagai panjar pembelian kopra. Cara ini sangat cocok dengan mentalitas orang Minahasa (khususnya Tonsea) yang senang hidup royal dan sangat tertarik untuk mendapatkan uang banyak secara mendadak, bukan hanya dari pendapatan panen kopra secara berkala (tiga bulan sekali), tetapi juga dari penerimaan perskot untuk penyerahan hasil panen yang akan datang. [20]

Kontrak berisi pernyataan bahwa selama perskot yang diterima tidak dilunasi setiap catur wulan secara teratur, petani harus membayar sejumlah besar bunga (sekitar 10 persen). Sebagai syarat tambahan tercatat bahwa untuk penyerahan yang tidak sesuai antara jumlah pikul dan harga yang berlaku saat penyerahan, petani dikenakan denda sebesar f 2,50 sampai f 5,-

---

[20] *Memorie van Rijn, ...Op. Cit.*

Ketika harga kopra sedang melambung tinggi dengan cara seperti ini petani dapat memperoleh ribuan gulden. Uang tersebut seringkali digunakan untuk membangun rumah, pembelian sawah, pembelian kebun kelapa, atau pembukaan tanah-tanah baru, tetapi lebih sering digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif.[27]

Jika terjadi penunggakan pembayaran perskot, mula-mula dimanfaatkan oleh para pedagang perantara untuk memperpanjang ikatan, toch mereka masih dapat bunga sebesar 10 persen per catur wulan belum lagi denda yang harus dibayar petani yang tidak menyerahkan kopranya yang sesuai dengan besarnya perskot. Harga kopra tidak ditentukan saat penandatanganan kontrak tetapi oleh keadaan harga saat penyerahan kopra. Di samping itu, para pedagang perantara mendapatkan untung tambahan dari cara kontrak seperti ini karena harga kopra dengan cara kontrak lebih rendah sekitar f 0,50 - f 0,75 per pikul bila dibandingkan dengan pembelian kontan. Di pihak lain, debitur (peminjam nang/penerima perskot) selalu merasa kekurangan uang untuk melunasi perskot karena ingin terus mendapatkan uang sebanyak mungkin, karena berpikir kelapa akan terus berbuah dan menghasilkan uang.

---

[27]Leirissa dengan mengutip van Doorn mengatakan bahwa uang tersebut umumnya digunakan oleh orang-orang Minahasa untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda dan merenovasi rumah mereka dengan menggunakan atap aluminium karena hal ini merupakan prestis tersendiri bagi orang Minahasa waktu itu. Hanya dua keluarga yang menggunakan uangnya untuk meningkatkan hasilnya secara lebih besar, satu di Tonsea untuk membeli mobil dan satunya di Tondano untuk memperluas perkebunannya. — Leirissa, "Copracontracten...." *Op. Cit.* halaman 7; C.L. van Doorn, "Uitreksel uit een rapport over het volkscredietwezen in de Minahasa (1925), Blaadje voor het Volkscredietwezen, Jrg. 7 (Juli 1926). Mieke Schouten melaporkan ada ratusan mobil yang lalu-lalang di jalan-jalan di Minahasa pada tahun 1920-an, termasuk mobil angkutan dan truk (Mieke Schouten, *Op Cit.* halaman 167) Sementara itu, laporan R. Broersma pada tahun 1928 menggambarkan orang Minahasa yang suka hidup royal sehingga pemerintah harus melindungi mereka dari praktik lintah darat yang dilakukan dalam sistem kontrak (Broeder, "Copra in de Minahasa III," *Economisch Weekblad*, 1932 halaman 712)

Selama harga kopra tinggi seperti pada tahun 1920-an, sistem ini menyenangkan untuk kedua belah pihak, karena keduanya berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi. Harapan kedua belah pihak untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin menjadi terusik ketika pada tahun 1929 terjadi krisis dan harga kopra ambruk sampai titik yang paling rendah pada tahun 1934 menjadi hanya f 1,25 per pikul. Dengan sendirinya, syarat-syarat dan kewajiban penyerahan kopra sebagai pembayaran perskot bukan hanya tidak dapat ditepati, bahkan dalam banyak kejadian harga perskot yang telah diberikan kepada petani kopra lebih besar daripada harga seluruh hasil kopranya.[28]

Untuk mendapatkan uang tunai guna keperluan hidup sehari-hari, petani kopra sering menjual kopranya secara diam-diam kepada pihak ketiga. Akibatnya, penagihan melalui pengaduan hukum menjadi lazim. Semua pembayaran bunga yang terlinggal dan denda yang terhutang akibat penyerahan kopra yang terlalu sedikit (tidak sesuai dengan hutang), yang dulu sering diterima demi mempertahankan ikatan, menjadi tidak lagi ditolerir. Bagi pengadilan kontrak adalah kontrak. Karena itu, terutama mengenai denda tidak jarang yang harus dibayar dengan jumlah yang mengejutkan, dan penagihan yang diputuskan sama sekali tidak seimbang dengan jumlah hutang (perskot) asal. Akibatnya muncul kebiasaan buruk dari sejumlah petani—seringkali dilakukan dengan niat jelek—dengan meminjam uang kepada pihak lain atau Bank Rakyat Tonsea di atas tanah yang digadaikan.

---

[28] *Memorie van Rijn, Op. Cit.* Biaya produksi kopra minimal f 5,- per pikul pada tahun 1920-an.

Jatuhnya harga kopra telah menyebabkan kehidupan ekonomi di Minahasa, terutama di kacamatan Tonsea dan Manado menjadi sangat memprihatinkan. Memang tidak ada data yang pasti tentang hutang-hutang petani kopra Minahasa. Tetapi beberapa sumber memperkirakan hutang tersebut mencapai antara 2,- sampai 5,- juta gulden.[29]

Para pedagang perantara seringkali menyalahgunakan posisinya yang lebih kuat untuk melakukan hal-hal yang merugikan petani kopra. Tindakan ini sudah dimulai sejak saat meminjamkan uang yang tidak selalu diberikan dalam jumlah penuh. Selanjutnya obligasi baru, yang merupakan pengganti yang lama, dibebani dengan denda dan bunga yang tinggi sebagai akibat penyetoran kelapa yang tidak cukup. Tekanan lain terhadap debitur adalah ancaman eksekusi (penyitaan), ditambah dengan ongkos akte serta berbagai komisi dan ongkos administratif, serta bunga yang mencapai 10 persen per catur wulan (masa panen).

Yang paling merugikan petani kopra adalah penentuan harga kopra harian yang seenaknya serta penetapan kadar kebasahan kopra dan penimbangannya yang semena-mena yang menguntungkan pihak kreditur, sehingga harga kopra yang diberikan kepada debitur-produsen seringkali 10 -15 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan harga pasar yang sebenarnya. Di samping itu, resiko harga kopra turun juga ditanggung

---

[29] *Ibid*. Laporan ini tampaknya diambil dari *Memorie van Toelichting*. Dalam memori ini dijelaskan bahwa hutang petani kopra terhadap para pedagang mencapai f 2 - 5 juta gulden dengan jumlah kontrak mencapai 3000 buah. Dari tulisan de Groot yang didasarkan atas laporan Controleur voor Agrarische Zaken di Menado, Luteyn, yang dipublikasikan pada bulan Maret 1940, dinyatakan bahwa jumlah hutang-hutang petani ternyata tidak lebih dari satu setengah juta gulden dengan kurang lebih 2.500 jumlah kontrak (De Groot, "Eenige Beschouwingen over de Copracontractenordonnantie", *Koloniał Studen*, No. 25, tahun 1941, halaman 109). Pantauw menyebutkan angkanya mencapai f 25.000.000,-. Data tersebut diambil dari Welvaart Fonds. (Pantauw, *Op. Cit* hal 9). Nilai ekspor kopra secara keseluruhan tahun 1934 adalah f 16.860.000,- (Verslag Omtrent Handel *Op Cit hal*. 30.

debitur. Pada kebanyakan kasus, jumlah kopra yang harus disetor debitur terlalu tinggi sehingga si kreditur tidak saja dapat mencegah debitur, untuk dapat menyetor ke pihak ketiga (pedagang lain), tetapi juga debitur, untuk kekurangan kopra yang harus disetor harus membayar denda sekian gulden untuk kekurangan setiap pikul kopra. Akibatnya debitur semakin lama semakin terjerat di bawah kekuasaan ekonomi kreditur, terutama saat harga kopra anjlog, sehingga harga kopra seringkali tidak cukup untuk menutup bunga.

Di samping peminjaman yang berupa kredit, masih banyak pula sistem kontrak yang berupa sewa kebun, yaitu penjualan hasil kebun untuk periode tertentu yang dijual dimuka (digadaikan) dengan harga beli sekaligus dibayarkan dimuka. Para pedagang perantara umumnya mempunyai toko yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari, di mana petani di samping meminjam uang, juga dapat memperoleh barang-barang dengan cara kredit. Bila kreditnya meningkat atau bila petani yang bersangkutan tidak mampu membayarnya, biasanya pembayaran hutang dilakukan dengan hak pemakaian sementara perkebunan kelapa sehingga perjanjian perskot beralih ke perjanjian sewa.[30]

Pada sistem ini kreditur mempunyai hak untuk memetik dan mengolah kopra dengan pekerja-pekerjanya sendiri, sehingga pemilik kebun tidak mempunyai kekuasaan lagi dalam pengolahan perkebunannya.

Bagi kebanyakan produsen kopra yang terbelit hutang dan kemudian langsung dieksekusi atas dasar ohligasi notarial atau *Landraadvonis* kemungkinan penyitaanatas pemilikan tidak hanya menyangkut perkebunan kelapa, tetapi juga meubel, rumah, ternak, alat pengangkutan, bahkan juga sawah dan kebun-kebun yang lain.

[30]De Groot, *Op. Cit.* halaman 109-110

Dalam sebuah surat kabar yang terbit di Minahasa, *Fikiran*, dapat dilihat pengumuman-pengumam lelang dari tanah-tanah yang telah dibeslah dari debitur oleh kreditur. Dalam satu iklan lelang yang dimuat tanggal 30 Juli 1932 misalnya, dinyatakan:

"Lelang:

1. Satu kebun kelapa di Tonsea luas 10 bau dengan 750 pohon kelapa berbuah
2. Satu kuintal dengan rumah
3. Satu kebun di Teteaga luas 60 tektek dengan 60 pohon kelapa berbuah
4. Satu kebun di Kajawu, Kokolah luas 8 tektek, dengan 70 pohon kelapa berbuah
5. Satu kebun di Likupang luas 6 tektek dengan 250 pohon kelapa (ada yang berbuah dan ada yang belum)
6. Satu kebun di Likupang luas 3 tektek dengan 50 pohon berbuah
7. Satu kebun di Kokoleh Kaki luas 6 tektek dengan 300 pohon kelapa berbuah
8. Satu kebun di Minewanua luas 3 tektek dengan 70 pohon kelapa berbuah
9. Satu kebun di Minawanua, Kokoleh luas 8 tektek dengan 80 pohon kelapa berbuah
10. Satu kebun di Kokoleh Kaki luas 6 tektek dengan 70 pohon kelapa berbuah
11. Satu kebun di Kenari, Batu luas 1/4 tektek dengan 10 pohon berbuah
12. Satu beun di Tomi-tomi, Batu, luas 1/2 tektek dengan 20 pohon kelapa berbuah

Kuintal dan kebun-kebun itu dijual dengan tanaman di dalamnya dan sudah dibeslah menurut kekuatan surat hutang (obligasi) dari Frederik Anah yang tinggal di Batu Tonsea. Eksekusi ini atas permintaan firma Hiap Hong di Manado, dilakukan oleh Mr. M.R. Rinkel, advocaat & procureur Raad Justitie Makasar."

Jual beli kopra dengan sistem kontrak seperti itu sebenarnya tidak diterima begitu saja. Pengalaman buruk yang menimpa petani kopra, yaitu jatuhnya harga kopra di bawah f 5,- akibat perang Dunia Pertama, menyebabkan pemerintah pada tahun 1918 mengeluarkan peraturan tentang agraria untuk Manado guna melindungi petani kelapa agar tidak kehilangan hak atas tanahnya (Staatsblad 1918 No. 80). Dalam peraturan

tersebut ditentukan bahwa penyewaan tanah terhadap orang-orang non pribumi harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Persetujuan penyewaan tanah selanjutnya akan ditetapkan dalam Burgelijk Wetboek. Dalam artikel No. 25 peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa jumlah uang perskot tidak boleh melebihi pembayaran kopra satu tahun. Pemberian perskot di luar peraturan itu dinyatakan tidak berlaku, dan penagihan kembali dari perskot tersebut tidak diizinkan. Sayangnya dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai penyewaan pohon, sehingga orang tetap saja dapat memanipulasi dengan mengganti redaksional kontrak, yaitu penyewaan tauah menjadi penyewaan pohon.[31]

Jauh sebelum itu, akibat krisis harga kopra yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama, pada tahun 1914, beberapa orang terkemuka di Airmadidi, ibukota Tonsea, yaitu kepala distrik E. Rotinsulu, wakil kepala distrik P.L. Monimat dan seorang kepala sekolah Pt. Tilaar berinisiatif untuk mendirikan bank perkreditan rakyat, yang disebut Volksbank Tonsea untuk membantu pembayaran hutang petani kepada para pedagang perantara (kemudian diikuti oleh Volksbank di Amurang, dan di Gorontalo, serta di Manado sendiri pemerintah mendirikan Gemeentelijke Crediet & Voorschotbank).[32] Tetapi bank-bank tersebut tidak banyak menarik kalangan petani kopra. Bank-bank tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang peusiunan atau pegawai.

Meskipun demikian, ketika harga kopra mulai merosot dan petani semakin terjepit oleh hutang-hutang dari pedagang perantara, Bank Rakyat Tonsea berupaya untuk mengatasi beban yang dihadapi petani dengan

[31]Broeder, "Copra in de Minahasa II", dalam *Economisch Weekblad*, 8 Oktober 1932, halaman 669

[32]Leirissa, *Op. Cit.* halaman 7.

memberikan kredit dalam jumlah besar agar petani dapat melepaskan diri dari jeratan hutang pedagang perantara. Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pinjaman tersebut benar-benar digunakan petani untuk melunasi hutang-hutangnya kepada para pedagang perantara. Hasil pemeriksaan dari pihak bank menunjukkan bahwa ternyata pinjaman bank tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang dari pedagang perantara sehingga hutang-hutang petani justru menjadi semakin membengkak.[33]

Pada tahun 1930 Asisten Residen Hamerster dalam kapasitasnya sebagai ketua Minahasaraad mengusulkan pembentukan koperasi untuk mengurangi pengaruh pedagang perantara. Dari situ kemudian dibentuk koperasi Pusat Pembelian Kopra (*Produkten Verkoop Centrale-PVC*) di Manado pada Desember 1930. Koperasi ini mulai beroperasi dengan modal f 80.000,- yang berasal dari anggota. Dari modal dasar tersebut, koperasi membeli kopra langsung dari petani. Sebagai ketua PVC adalah Arnold Mononutu.[34]

Dari tulisan Broeder yang sumbernya berasal dari berbagai publikasi seperti laporan Volkscreditwezen dan catatan-catatan Volksraad dapat diketahui bahwa pada awalnya PVC berkerja dengan rugi besar. Dari modal awal tersebut, tercatat tertinggal dalam tunggakan hutang mencapai f 46,700 pada tahun 1932.[35]

---

[33]Broeder, "Copra in de Minahasa iv,", *Economisch Weekblad*, 11 Nopember 1932, halaman 762

[34]Leirissa, *Op. Cit.* halaman 9. Broeder mencatat modal PVC tersebut besarnya f 78.000,- (Broeder, "Copra in de Minahasa iv," *Op.Cit.*)

[35]*Ibid.* Hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Minahasa. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, sejak zaman sebelum krisis (malaise) ekonomi petani di Indonesia sangat menyerupai suatu "ekonomi hutang" dan hutang itu semakin membengkak akibat malaise. Karena jhanya produk pertanian pada masa malaise itu jatuh, petani harus menanggung beban hutang yang begitu rupa sehingga jika pemerintah tidak segera turun tangan dapat merusak tatanan ekonomi desa. Tunggakan hutang petani di bank-bank rakyat mencapai 55,66% pada tahun 1933 (13,5 juta gulden) (Sumitro Djojohadikusomo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal 252-253, dan 62).

Pemerintah kemudian melakukan penelitian tentang kondisi ekonomi Minahasa. Untuk itu pemerintah mengirim Dr. E. de Vries, Kepala Bagian Ekonomi, Departemen Ekonomi pada bulan Agustus 1937 untuk melakukan penelitian di Minahasa, dan ia tinggal cukup lama di sana. Hasil penelitian antara lain mengungkapkan bahwa hutang-hutang petani kopra terutama dilakukan ketika harga kopra tinggi dan sekarang karena bunganya terus berkembang, hutang-hutang itu menjadi membengkak dan bahkan kalau seluruh kebun kelapa dan rumahnya yang dijadikan jaminan persekot itu disita, belum dapat melunasi seluruh hutang yang harus dibayarkan.

Atas inisiatif Departemen Urusan Ekonomi, bank-bank rakyat di seluruh Hindia Belanda pada tahun 1934 disatukan ke dalam *Algemeene Volkscredietbank* (AVB).[36] Demikian juga di Minahasa.

Langkah konkret selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membebaskan hutang-hutang para petani kelapa. Dalam hal ini Algemeene Volkscredietbank (AVB) bekerja sama dengan koperasi Producten Verkoop Centrale (Pusat Penjualan Produk – PVC) yang mendapat tugas untuk melakukan rencana pemerintah tersebut. AVB membayar hutang-hutang para petani kopra. Sebaliknya petani harus menyerahkan kopranya kepada PVC.

---

[36]Pernyataan itu didasari oleh krisis keuangan pada *Centrale kas* sebagai lembaga pusat penyediaan dana pinjaman akibat tunggakan para peminjam yang disalurkan melalui bank-bank Rakyat.

Jumlah tunggakan pinjaman dari bank-bank Rakyat di Jawa dan Madura pada tahun 1934 mencapai 770% dan bila dinyatakan dalam persentase dari keseluruhan pinjaman tahun-tahun sebelumnya yang belum lunas, kenaikan itu mencapai 1.700%. Dalam tahun 1932 dari 74 bank Rakyat yang ada di Jawa dan Madura, hanya 24 yang mencatat saldo laba, dan dalam tahun 1933 jumlah itu berkurang menjadi 13.

Di luar Jawa keadaanya lebih buruk lagi. Dalam periode 1929-1934 pinjaman yang dikeluarkan berkurang di daerah karet sebesar 89%, di daerah kopra 39%, dan di daerah lainnya 62%. Angka tunggakan untuk masing-masing di daerah karet 572%, daerah kopra 692%, dan daerah lainnya 473% (Sumitro Djojohadikusumo, *Op. Cit*, hal 156).

Sejak tahun 1936 AVB memberi dukungan dana kepada PVC dengan bantuan kredit sebesar f 350.000,-. Hubungan PVC dengan AVB sangat baik: Anggota PVC menyerahkan kopranya kepada PVC, sementara itu AVB yang bertanggung jawab dalam penyediaan dana untuk membayar kopra. Dengan demikian PVC menjadi pedagang kopra terbesar di Minahasa dengan dukungan keuangan dari AVB.[37]

Masalah hutang persekot kopra Minahasa ini telah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian dan bahan diskusi yang gencar baik di *Minahasaraad* maupun *Volksraad* di Batavia. Pemerintah setempat berulangkali mengajukan kepada pemerintah pusat agar diadakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut, tapi pemerintah pusat keberatan karena keadaan keuangan negara yang belum memungkinkan.

Baru setelah kunjungan Direktur Urusan Ekonomi T. Hart pada tahun 1935 ke Manado, pemerintah pada bulan Oktober 1935 menempatkan seorang kontroleur agraria khusus Manado yang mendapatkan tugas terutama: a) untuk memeriksa secara tuntas apakah penyehatan ekonomi rakyat masih dapat dilakukan, b) jika ya, kontroleur diminta memasukkan usulan-usulan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Penelitian kontroleur menggambarkan bahwa pemberi persekot pada umumnya bersedia bekerjasama untuk menyehatkan ekonomi rakyat (kopra) dan tidak keberatan terhadap aturan yang ada. Kontroleur juga berpendapat bahwa untuk melakukan penyehatan ekonomi secara nyata, perlu dibuatkan aturan-aturan hukumnya. Laporan kontroleur masuk pada April 1937 dan setelah itu pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan untuk segera

---

[37] Leirissa, *Op.Cit.* halaman 10.

mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pada bulan Agustus 1937, Kepala Bagian Ekonomi Departemen Urusan Ekonomi Dr. E. de Vries ditugaskan untuk mengadakan kunjungan ke Minahasa. Sebagai hasil pemeriksaan De Vries, dibuatkan usulan untuk dibuatkan Ordonansi kontrak kopra.

Untuk membuat usulan itu, di Batavia diadakan rapat-rapat yang juga melibatkan kontroleur dinas agraria Minahasa yang dipanggil ke Batavia pada April 1938. Hasilnya berupa usulan yang diperkirakan dapat diterima oleh berbagai instansi terkait (Departemen Kehakiman, Agraria, dan Urusan Ekonomi), sehingga dalam bulan Desember 1938 usulan tersebut dapat diajukan ke *Volksraad* untuk mendapatkan persetujuan. Jadi dari usulan ordonasi kontrak itu adalah larangan pemberian persekot kepada pedagang yang tidak memiliki izin pembelian. Izin itu diberikan kepada pedagang yang mempunyai reputasi baik.

Pada saat yang sama di Minahasa diadakan pembicaraan antara pengusaha Eropa dan Cina yang hasilnya menentang usulan tersebut. Gerakan yang dipimpin oleh mantan Notaris de Beste yang merupakan lawan keras dari pemerintah setempat itu, secara tendensius berusaha untuk menghapus pedagang perantara dan kelompoknya berusaha untuk mendapatkan monopoli dalam penjualan hasil-hasil kopra. Usaha de Breste ini gagal dan usulannya di *Volksraad* ditolak tanpa pemungutan suara.

Pada tahun 1939 pemerintah mengeluarkan *Regeeringsverordening* (Peraturan Pemerintah) dalam Copracontracten Verordening Menado (Staatsblad 1939 No. 93). Pada saat Ordonansi ini dikeluarkan (1 April 1939) tercatat hutang para petani dari kontrak kopra termasuk biaya pembebasan hutang dari AVB yang harus dilunasi petani besarnya f

2.000.000 dari 3000 kontrak. Dari jumlah itu sebesar f 1.283.000,- atau 92,5 persen terdapat di Kecamatan Manado dan Tonsea. Jika tiap tahun dapat dibayarkan 35 persen, maka diharapkan pada tahun 1942 hutang-hutang petani yang disebabkan oleh kontrak-kontrak kopra itu sudah habis dibayarkan.[38]

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah mengeluarkan Ordonansi Kontrak Kopra Menado yang dituangkan dalam Beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 36 Tgl. 4 Maret 1939 (Staatsblad 1939 No. 92).

Esensi Ordonansi ini dituangkan dalam 2 bagian ketentuan yang ditetapkan dalam artikel 2 yang menyebutkan hanya pedagang kopra yang memiliki izin pembelian kopra yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang diperbolehkan mengadakan kontrak kopra. Pada alinea 2 artikel 2 ini disebutkan bahwa izin-izin pembelian (kontrak) hanya diberikan kepada pedagang yang telah didaftar oleh Residen Manado. Pendaftaran diri sebagai pedagang hanya dilakukan bila pedagang kopra yang bersangkutan setuju dengan Ordonansi itu dan mempunyai reputasi baik. Peraturan pelaksanaan Ordonansi itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang dimuat dalam *Copracontracten Verordening Manado*, yang diberlakukan bersamaan dengan Ordonansi tersebut.[39]

Ketentuan penting dalam Peraturan Pemerintah itu adalah, di samping pelaksanaan pendaftaran administratif, juga ditentukan bahwa residen dapat mengajukan syarat kepada pedagang kopra yang didaftar. Untuk itu, Residen Menado mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 1 April

---

[38]Memorie van Rijn.. *Op. Cit.* halaman 103-105
[39]De Groot, *Op. Cit.* halaman 103

1939 No. C3/II/23 tentang syarat-syarat untuk menjamin perdagangan kopra yang baik. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa pedagang tidak mempunyai reputasi baik antara lain bila ia:

a. Menentukan rente yang lebih tinggi dari 5 persen per catur wulan;
b. Tidak memberikan kwitansi yang dibuat dengan benar kepada produsen kopra pada saat penyerahan kopra;
c. Menentukan denda yang lebih tinggi dari 1,50 gulden untuk setiap kekurangan sekian pikul kopra yang disalurkan;
d. Menaikkan jumlah denda terhadap kekurangan penyetoran.

Selanjutnya dalam artikel 13 Ordonansi disebutkan bahwa masa kontrak kopra paling lama 5 tahun. Kepada petani dilarang menerima kontrak yang uilainya lebih besar dari perkiraan hasil penanaman kelapa. Produsen juga dilarang (artikel 14) membuat perjanjian kontrak baru yang dapat memutuskan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian yang lama.

Laporan de Groot, mantan notaris juru lelang di Manado menggambarkan bahwa Ordonansi kontrak kopra ini ternyata mempuuyai daya preventif yang sangat tinggi. Jumlah persekot dau perjanjian kontrak pada tahun 1941 atau sekitar satu tahun setelah Ordonansi tersebut dijalankan, menurun. Keadaan yang menguntungkan terjadi karena adanya aksi pembebasan hutang dari AVB yang mengambil alih hutang petani-produsen kepada para pedagang. Ordinasi itu yang mendorong lancarnya pembebasan hutang. Dengan rodinasi itu praktis semua kontrak dengan unsur kridit yang sudah lazim di Minahasa terkena dampaknya, karena kontrak hanya boleh dibuat oleh pedagang kopra yang mempunyai izin dari pemerintah, yang hanya diberikan kepada pedagang yang sudah memiliki nama baik.

Kriteria itu memberikan kemungkinan untuk mengadakan pembersihan terhadap unsur-unsur yang tidak diinginkan, sehingga yang dapat bertahan hanyalah pedagang yang bonafide.[40] Aksi pembebasan hutang di bulan-bulan terakhir tahun 1940 sangat mulus karena adanya kebutuhan pedagang terhadap uang tunai di samping adanya kemauan politik pemerintah untuk memungkinkan bank dapat menyediakan dana segar dalam rangka pembebasan hutang-hutang petani tersebut.[41]

Masalah kopra ternyata tetap saja muncul karena pemasarannya yang terus menghadapi berbagai kendala. Perang Dunia II kemudian menyusul setelah masa malaise sedikit dapat terlewati. Akibat perang tersebut, kopra tidak dapat lagi dipasarkan di pasar dunia. Sementara itu, AVB yang semula melalui PVC melakukan pembelian kopra mengalami kelebihan likuidasi. Harga kopra kembali menurun. Karena itu muncul pemikiran agar pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas menampung pembelian kopra sehingga harga kopra dapat dikendalikan.

Untuk pengaturan pembelian dan penimbunan, serta penjualannya kembali, Direktur Perdagangan pada tanggal 13 Septemner 1940 mendirikan lembaga yang disebut *Het Coprafond* atau Yayasan Kopra, sebuah perusahaan semi pemerintah yang didirikan untuk membeli, menampung, dan mengekspor kopra. Yayasan ini mendapat tugas untuk melakukan pembelian kopra dengan bantuan keuangan dari *Javasche Bank* sehingga terjadi kestabilan

---

[40]Ditempat lain penebusan pohon-pohon yang telah digadaikan dilakukan melalui koperasi. Produsen yang pinjam uang di bank-bank untuk menebus hutang-hutangnya itu, harus berjanji untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya Koperasi yang mengumpulkan hasil pohon-pohon yang telah dibebaskan dari hutang. Dari hasil pengumpulannya mereka harus membayar hutang kepada bank dan biaya administrasi Koperasi, sedangkan sisanya dapat diambil oleh produsen/petani. (Sumitro Djojohadikusumo, *Op. Cit.* halaman 264).

[41]*Ibid.* halaman 110

harga. Yayasan ini dipimpin oleh seorang direktur yang dalam menjalankan tugasnya, harus bertanggung jawab kepada sebuah dewan pengawas. Selanjutnya ditunjuk seorang inspektur *Coprafond* yang ditempatkan di Makasar, dan di Manado seorang ajun inspektur sebagai pengawas.[42]

Pembelian kopra dilakukan secara langsung. Misalnya di Minahasa ditempatkan perwakilan yang secara langsung melakukan pembelian kopra yang bertanggung jawab terhadap jumlah yang harus dibayar dan kualitasnya. Kemudian ada juga gudang-gudang yang dipimpin oleh seorang pimpinan gudang dan seorang ahli kir. Keduanya bertanggung jawab untuk mengkir dan menimbang, serta memberi perintah keluar-masuknya kopra. Di seluruh Manado terdapat beberapa tempat penimbunan dan pembelian kopra, yaitu di Tahuna, Manado, Bitung, Kema, Kotabunan, Amurang, Inobonto, Kwandang, Gorongtalo, Toli-toli, Douggala, dan Poso. Biaya pengangkutan ke tempat-tempat penimbunan ditanggung oleh Yayasan.

Menurut laporan van Rijn, pembelian kopra melalui Yayasan Kopra berjalan mulus, dan dilakukan dengan cara yang baik sesuai aturan. Beberapa peraturan yang memungkinkan berjalannya Yayasan kopra antara lain adalah:

1. Larangan pengangkutan kopra dari daerah yang harganya rendah ke daerah yang harganya lebih tinggi seperti di Minahasa dan Bolaang, kecuali kopra yang memang untuk diekspor. Dengan demikian tidak

---

[42] *Bestuurmemorie* van Rijn, *Op. Cit.* halaman 34 dan 100. Diperkirakan pemerintah akan membeli kopra dari seluruh kopra yang diproduksi petani sekitar 400.000 ton per tahun. Bersama biaya transpor dan pendirian gudang-gudang, De Javasche Bank harus menyediakan dana sebesar sekitar f 11.000.000,-(*Pedoman Tani, ...Op. Cit.*) Nasib yang sama dialami oleh perkebunan karet rakyat di Kalimantan dan Sumatera. Di kedua daerah itu, untuk melindungi petani karet didirikan yayasan karet atau Rubber *Fonds* (Pantouw, *Op. Cit.* halaman 10).

ada spekulan yang berusaha mencari untung dengan membeli kopra di daerah yang murah harganya untuk dijual di daerah yang harga kopranya lebih tinggi.

2. Penetapan harga pedoman yang harus dibayar kepada masyarakat. Mula-mula penetapan harga ini mengalami kesulitan karena para pedagang perantara tidak merasa puas dengan keuntungan yang diperolehnya. Untuk mengatasi masalah ini Yayasan memberikan sanksi berupa daftar hitam dan penolakan penampungan kopra dari pedagang perantara yang mau mencari untung sendiri. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan koperasi-koperasi untuk mensuplai langsung kepada Yayasan, yang akhirnya dilakukan pembelian langsung yang dilakukan oleh Yayasan. Dengan cara ini, para pedagang perantara tidak dapat bergerak lagi dalam perdagangan kopra.
3. Manado Produce Co. (MPC) yang selama ini mendapatkan monopoli pembelian kopra tidak lagi diberikan hak monopolinya, dan hanya dijadikan sebagai penghimpun kopra untuk Yayasan.
4. Perbaikan kualitas kopra yang dilakukan dengan cara pemeriksaan yang ketat terhadap mutu kopra pada waktu pembelian.

Selain tugas utama menstabilkan pasar kopra dalam negeri, Yayasan Kopra juga mempunyai tujuan-tujuan lain, yaitu dengan jaringan agen dan gudang-gudangnya yang luas, Yayasan merupakan perangkat yang ideal untuk meningkatkan dan menstandarisasikan mutu kopra di Hindia Belanda.[43]

---

[43] *Kemelut Demokrasi Liberal*.. *Op. Cit.* halaman 398

Sistem Transportasi

Transportasi merupakan satu hal yang penting dalam proses pendistribusian sebuah produk. Transportasi juga merupakan salah satu komponen penting dalam dunia industri disamping produksi dan konsumsi. Dalam sistem perdagangan kopra, tranaportasi merupakan satu hal yang penting dan selalu mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan yang terlibat dalam dunia perdagangan. Transportasi ini akan meliputi kegiatan pengangkntan barang dari kebun ke tempat-tempat pembuatan kopra, sampai kopra jatuh ke tangan konsumen.

Kelapa dipanen setiap tiga bulan sekali. Buah-buah kelapa yang telah dipetik dari pohon-pohon kelapa yang jaraknya sekitar 10 meter antara pohon yang satu dengan lainnya itu, kemudian diangkut dengan gerobag ke tempat-tempat pembuatan kopra. Pengangkutan kelapa ini biasanya diborong sekaligus oleh tukang panjat. Biaya angkutan dari kebun ke tempat pembuatan kopra biasanya ditentukan per 1000 buah. Jika dihitung persentasenya dalam seluruh proses produksi, maka angkutan ini akan menelan biaya sekitar 20 persen. Komponen penting dalam proses produksi kopra bagi produsen adalah: ongkos pemetikan dan pembuatan kopra yang diborongkan kepada pihak lain sebasar 40 persen; untuk pemilik kebun 40 persen; dan biaya pengangkutan 20 persen (termasuk sewa gerobag).

Setelah siap dipasarkan, kopra kemudian dikirim ke tempat-tempat penampungan kopra yang letaknya di kota-kota kecamatan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang memudahkan pengangkutan melalui sepanjang pantai Minahasa. Selanjutnya, oleh pedagang perantara yang menampung kopra tersebut, kopra dikirim dengan perahu ke pelabuhan Manado atau

AAB/V

Kenia. Para pedagang perantara yang kebanyakan orang-orang Cina, umumnya mempunyai alat pengangkutan pantai. Mereka setelah memperoleh kopra dari para produsen yang kebanyakan kebasahannya masih tinggi presentasenya, dikeringkan dulu selama beberapa hari. Setelah itu kopra baru dapat dikirim ke pedagang besar (pengekspor) yang kebanyakan orang-orang Eropa yang ada di Manado. Dari Manado kopra kemudian di kirim langsung ke negara pengimpor melalui pelabuhan-pelabuhan besar Eropa seperti Eropa atau Amerika.

Pengiriman kopra antarpantai pada awalnya menggunakan perahu-perahu layar antarpantai yang semula dikuasai oleh orang-orang Cina dan Arab. Setelah pemerintah Belanda meluaskan monopoli pelayaran antarpantai dengan menggunakan sebuah perusahaan negara yang disebut Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) jaringan pelayaran antarpantai milik orang-orang Cina dan Arab tersebut menjadi hancur.

Meskipun demikian, pelayaran niaga antarpantai yang dikuasai oleh orang-orang Cina dan Arab serta Jepang (Mokuny) itu tidak hilang begitu saja. Mereka selama beberapa tahun menjadi saingan berat bagi KPM. Walaupun di beberapa daerah KPM telah dapat memonopoli pelayaran antarpulau untuk mengangkut barang-barang sampai ke pelabuhan samudra yang terdapat di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, dan Makasar sejak 1878, [44] tetapi untuk pengangkutan kopra di Minahasa KPM tidak dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan karena ekonomi kopra merupakan ekonomi Rakyat/swasta yang tidak ditentukan oleh pemerintah, sehingga

[44]Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peranan KPM dalam pelayaran antarpulau dapat dipelajari pada J.N.F.M. a' Campo, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaarten Staatsvorming in de Indonesische Archipel 1888-1914*, Roterdam: Erasmus Universiteit, 1992

rakyat, produsen dan pedagang kopra bebas mengangkut kopra dengan angkutan apa saja yang murah menurut mereka. Kopra merupakan komoditi bebas yang produksinya 90 persen dikuasai oleh petani pribumi.

Sebagai komoditi perdagangan bebas yang masuk ke pasar dunia, pengangkutan kopra juga sangat tergantung pada sistem pelayaran bebas. Kopra Minahasa diangkut langsung dari pelabuhan Manado ke berbagai pelabuhan besar dunia terutama Eropa dengan kapal-kapal carteran. Karena itu tarif pengangkutan kapal-kapal carteran pun sangat kompetitif selama perdagangan kopra masih menguntungkan. Bandar Manado pun tetap menjadi pelabuhan bebas untuk kapal-kapal asing. Para pedagang Amerika misalnya mengangkut kopra dari pelabuhan Manado ke pantai Pasifik dengan kapal-kapal carteran dari Java-Pacific Lijn (SM Nederland en Rotterdamse Lloyd), Kerr SS Coy (Silver Line), Klaveness Liue, dan Dollar Line.

Beberapa firma milik orang Cina seperti Lie Boen Yat & Co yang semula hanya bergerak dalam perdagangan perantara yang sekaligus menguasai angkutan antarpantai mulai meluaskan sayapnya untuk bergerak dalam perdagangan ekspor. Kopra yang berhasil ditimbunnya dari petani diekspor sendiri ke berbagai negara di Eropa dengan kapal carterannya sendiri.

Bagi KPM yang sudah mengantongi hak monopoli pengangkutan laut antarpulau, keadaan seperti ini tidak menguntungkan. Pada tanggal 1 Pebruari 1934 Direktur KPM Pronk, menulis surat kepada Direktur Urusan Ekonomi, Hart, yang isinya mengusulkan agar pelabuhan Ternate, Gorontalo, dan Manado ditutup. Selanjutnya kopra yang ada di sepanjang pantai di daerah-daerah tersebut diangkut dengan kapal-kapal KPM (Cekumij) ke

Makasar. Dari pelabuhan Makasar inilah kopra kemudian diangkut ke negara tujuan.[45]

Untuk menyakinkan usulannya, Pronk menunjukkan bahwa pada tahun 1933 dari wilayah Nusantara bagian timur diekspor 290.000 ton muatan ke Eropa. Dari jumlah itu, ekspor kopra mencapai 284.000 ton. Dari 284.000 ton itu, 162.000 ton berasal dari daerah sekitar Gorontalo dan Manado. Jika kopra diangkut dari pelabuhan-pelabuhan tersebut langsung ke Eropa dengan kapal-kapal carteran, maka KPM akan kehilangan keuntungan sekitar 30 persen. Ini akan berakibat, menurut Pronk, akan diperkecilnya jalur KPM yang melayani angkutan bagian timur Makasar sehingga pelayaran yang teratur dari KPM di wilayah tersebut menjadi tidak mungkin dilaksanakan.

Dari surat Pronk tersebut, Hart bersama kepala Inspektur, dan kepala Dinas Pelayaran kemudian mengadakan perjalanan ke Sulawesi dan Maluku pada September 1935 guna menyelidiki kebenaran surat Pronk. Hasil perjalanan itu kemudian menghasilkan sebuah laporan rahasia setebal 135 halaman yang ditujukkan kepada Gubernur Jenderal yang ditembuskan ke Raad van Nederlandsch-Indie, Komandan Angkatan Laut, Direktur Financien, Direktur Pemerintahan dalam Negeri, Gubernur Sulawesi, Residen Manado, dan Residen Maluku. Isi laporan tersebut menuduhkan bahwa pelabuhan Gorontalo, Amurang, dan Toruna, daerah bagian utara Minahasa mulai dari Poigar sampai ujung utara pantai timur daerah tersebut sampai Toktok ditutup untuk umum, kecuali untuk kapal *Manado Produce Company*, sebuah perusahaan Denmark dengan alasan karena perusahaan ini

---

[45]Surat G.H.C. Hart kepada Gubernur Jendesal, 10 Desember 1935 (Geheim), BB 116 ANRI

telah mengangkut kopra secara teratur ke Eropa sejak 1921. Sedangkan Bandar Manado tetap dijadikan pelabuhan basis bagi wilayah Sulawesi Utara.[46] Kapal-kapal asing hanya boleh singgah di Makasar. Selanjutnya kopra dari Minahasa dan sekitarnya diangkut dengan kapal-kapal KPM atau kapal-kapal yang bergabung dalam *Batavia Vrachten Conferentie* (BVC).

Keputusan Hart ini mendapat kecaman keras dari para pedagang Cina yang telah lama menguasai pelayaran antarpantai. Dalam sebuah laporan di Minahasa Post bahkan digambarkan banyaknya orang yang kecewa terhadap keputusan Hart. Dilaporkan bahwa Hart hanya mengadakan dengar pendapat dengan oraug-orang tertentu saja. Di samping itu, ketika mengadakan dengar pendapat umum, dialog diadakan dalam bahasa Belanda, padahal banyak pengunjung yang datang tidak dapat berbahasa Belanda sehingga tidak mengerti apa yang dijadikan bahan pembicaraan dengan Hart. Sementara itu, pengunjung yang dapat berbahasa Belanda adalah orang-orang tertentu yang sudah direkayasa untuk mempengaruhi Hartagar mengambil keputusan seperti itu.[47] Protes keras juga datang dari para Jogugu (raja) di Gorontalo. Mereka menulis surat Ke Hart yang ditandatangani oleh para Jogugu di wilayah Gorontalo yang isinya keberatan atas penutupan pelabuhan Gorontalo karena dengan penutupan tersebut mereka sulit memperoleh sarana pengangkutan kopra secara bebas.[48]

---

[46] *Ibid.*

[47] *Minahasa Post*, 10 Nopember 1935 halaman 6 - 7; 10 Desember 1935, halaman 6 - 7

[48] Lampiran Surat Hart, *Op. Cit.* Upaya untuk melaksanakan monopoli pengangkutan di pelabuhan Manado sudah dimulai sejak KPM memperoleh hak monopoli tahun 1888. Tapi usaha tersebut selalu gagal karena Manado tetap menjadi pelabuhan bebas. Dalam surat Europeesche heudelhuizen yang ada di Manado kepada Residen Manado 1898 dapat dilihat keinginan para pedagang agar Manado tetap dijadikan pelabuhan terbuka (Financien 738) ANRI.

Masalah lain pasca kunjungan Hart, selain protes-protes tersebut adalah kanyataan bahwa Cekumij sebagai anak cabang dari KPM tetap mendapat saingan dari Mokumy sebuah perusahaan pelayaran Jepang di bawah Celebes Develop & Co, yang baru beroperasi sekitar 1935. Perahu penangkap ikan milik Jepang ini mengangkut kopra dari pantai-pantai di Minahasa ke pelabuah Manado, karena pelabuhan ini tetap membuka pelayaran terhadap luar negeri. Para pedagang kopra lebih senang mengangkut kopra mereka dengan Mokumy karena tarifnya lebih murah daripada Cekumij.[49]

Upaya KPM memonopoli pengangkutan laut di wilayah Manado baru berhasil setelah pemerintah mendirikan Yayasan Kopra. Yayasan ini memonopoli pembelian kopra agar harga kopra stabil dan untuk menjaga neraca keuangan pemerintah. Sedangkan untuk pengangkutan kopra dari gudang-gudang penimbunan di beberapa pantai di Minahasa, dikuasakan kepada KPM, yang kemudian mendirikan maskapai pelayaran baru yang bernama Noord Celebes Molukken Kustvaart Maatschappij dengan kapal-kapal berukuran antara 100-250 ton. Kapal-kapal ini berfungsi mengunpulkan kopra dari pelosok-pelosok ke tempat-tempat penampungan yang dilayari oleh kapal-kapal KPM dari lijn 18 dan 19.[50]

---

[49] *Memorie van Overgave* Stuurman, 1936, halaman 99, ANRI

[50] J.M.J. Pantouw, *Perdagangan Kopra* (tanpa tahun dan tempat terbit).

Bab V
Kesimpulan

Pembudidayaan kopra merupakan matapencaharian utama masyarakat Minahasa. Sebagai produk dari pertanian rakyat, perdagangan kopra di Minahasa mempunyai karakter tersendiri. Sistem jual beli kopra tidak dilakukan melalui pasar terbuka dalam bentuk fisik, tetapi melalui sistem kontrak. Karena itu struktur perdagangan kopra terdiri atas tiga unsur, yaitu produsen (petani), pedagang perantara, dan pedagang besar (eksportir).

Struktur perdagangan seperti itu sebenarnya sangat rawan bagi petani yang menempati posisi paling bawah. Mereka tidak mempunyai posisi tawar-menawar dalam jual beli kopra karena terikat oleh sistem kontrak. Kapanpun petani dapat kehilangan lahannya dan kekayaan lainnya yang dijaminkan dalam sistem kontrak jika mereka tidak dapat menyerahkan kopranya sesuai kontrak. Sebaliknya, pedagang perantara dapat meraup untung sebesar-besarnya baik dari keuntungan selisih harga maupun dari bunga uang muka yang diberikan. Tidak sedikit diantara mereka (pedagang perantara) bahkan dapat menyita semua harta milik petani yang dijadikan jaminan kontrak. Dalam posisi seperti ini pedagang perantara sangat kuat dan merupakan spekulan yang dapat meraup kekayaan dari sistem kontrak. Tetapi secara kultural, masyarakat Minahasa tidak seperti mayarakat petani yang digambarkan oleh Le Roy Ladurie dalam teorinya tentang siklus besar agraria. Karena itu apa yang terjadi di Longuedoc sebagaimana yang digambarkan Ladurie tidak terjadi di Minahasa.

Ketika harga kopra jatuh pada tahun 1915 orang-orang kaya Minahasa tidak memanfaatkan peluang untuk memborong kebun-kebun kopra yang menjadi merosot harganya, tetapi justru mendirikan bank rakyat (*Volksbank Tonsea*), kemudian *Productien Verkoop Centraal* pada masa malaise guna memberikan kredit ringan bagi para petani. Cara ini dapat menolong petani dari cengkeraman para pedagang perantara. Dengan demikian petani terlindungi dari beban-beban hutang yang dapat membuat mereka kebilangan tanah-tanahnya karena disita oleh pedagang sebagai ganti pembayaran uang kontrak beserta bunga-bunganya yang tinggi.

Selain itu, meskipun pembudidayaan kopra merupakan usaha swa karya petani secara mandiri, pemerintah Hindia Belanda ikut membantu mengatasi krisis petani kopra, misalnya dengan mengeluarkan Undang-undang tentang kontrak-kontrak kopra yang dikenal dengan *Copracontracten Ordonning Menado* (1939). Dalam Undang-undang itu diatur tentang persyaratan pedagang perantara yang dapat melakukan kontrak. Dengan Undang-undang itu pemerintah dapat mengontrol pelaksanaan kontrak sehingga petani dapat terlindungi dari para spekulan. Undang undang lainnya adalah larangan pemilikan tanah buat orang-orang asing, seperti orang-orang Cina dan Arab yang menguasai perdagangan perantara, serta orang-orang Eropa sendiri.

Gambara Lindblad tentang tiga tahap perkembangan perdagangan di luar Jawa juga perlu ditinjau secara kritis perdagangan kopra di Minahasa. Pada fase ketiga, yaitu zaman malaise, meskipun nilai ekspor kopra Minahasa menurun, tetapi volumenya terus naik. Produksi kopra Minahasa pada zaman malaise terus meningkat meskipun harga kopra jatuh. Hal inidisebabkan karena beberapa hal, misalnya, untuk menutupi kekurangan

pendapatan akibat jatuhnya harga, petani Minahasa memilih untuk meningkatkan produksinya, sejauh produksi itu dapat dijual. Pilihan itu dimungkinkan karena adanya lembaga yang dapat menampung produk kopra petani seperti *Producten Verkoop Central* (PVC), sebuah koperasi yang bergerak dalam penampungan penjualan kopra sehingga harga kopra tingkat lokal dapat dikendalikan. PVC sendiri dapat bergerak karena adanya bantuan keuangan dari *Algemene Volkscrediet Bank* (AVB). Selanjutnya, ketika lembaga keuangan itu tidak lagi mampu menampung pembelian kopra, pemerintah sendiri kemudian mendirikan Yayasan Kopra (*Het Coprafonds*) pada September 1940. Melalui bantuan keuangan *Javasche Bank*, Yayasan itu ternyata sangat efektif untuk menampung penjualan kopra petani. Sayangnya usaha itu tidak dapat berlangsung lama karena pecahnya Perang Dunia II, terutama setelah jatuhnya negara pengimpor kopra seperti Denmark, Norwegia, Belgia, dan Belanda sendiri.

Dengan ikut campurnya kalangan masyarakat tertentu dan pemerintah terhadap masalah petani kopra pada saat-saat krisis harga kopra, kemunculan para spekulan untuk menguasai tanah-tanah pertanian dapat dihindari. Pedagang perantara sebagai spekulan tidak dapat bergerak bebas untuk menguasi tanah pertanian dengan jalan menyita tanah-tanah petani yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Meskipun kopra merupakan produk andalan dan matapencaharian utama rakyat Minahasa, tetapi dalam liruk-pikuknya perdagangan kopra selama periode yang menjadi bahasan tesis ini, tidak ada orang Minahasa yang bergerak dalam bidang perdagangan kopra. Orang Minahasa lebih senang bekerja pada bidang pekerjaan yang relatif aman secara ekonomi seperti sebagai pegawai negeri, menjadi juru tulis kantor atau tentara, serta

krani-krani kapal selain tentu saja sebagai petani. Sebagai petanipun, tidak sedikit di antara mereka yang mempekerjakan orang lain seperti orang-orang Sangir, atau Bolaang Mongondow dalam proses produksi kopra. Perdagangan kopra sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Cina dan sebagian kecil Arab pada tingkat pedagang perantara dan orang-orang Eropa dan satu dua Timur Asing (Cina dan Jepang) pada tingkat perdagangan ekspor.

Dalam keadaan krisis pemerintah banyak ikut campur mengatasi kesulitan perdagangan kopra. Sebaliknya, dalam keadaan normal, seperti ketika terjadi boom kopra pada tahun 1920-an pemerintah tidak banyak ikut campur dalam masalah perdagangan kopra. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari pajak perdagangan. Sikap pemerintah Belanda yang seperti itu sebenarnya hampir sama dengan pandangan ekonom neo klasik.

Kepustakaan

Arsip

1. *Memorie van overgave Resident Manado*, J. Tideman, 23 Februari, 1926 (Microfilm, ANRI).
2. *Memorie van overgave Resident Manado*, A. Ph. Van Aken, 9 Mei, 1932 (Microfilm, ANRI).
3. *Memorie van overgave Assistent* Resident Manado, A. Stuurman, 10 July, 1936 (Microfilm, ANRI).
4. *Memorie van overgaw Assistent Resident Manado*, U. J. Weg, 1938 (Microfilm, ANRI).
5. *Memorie van bestuur Resident Manado*, M. Van Rijn,, Mei, 1941 (Microfilm, KITLV).
6. *Missive Controleur Toudano*, 8 Februarie, 1910, BB No. 2526, ANRI.
7. *Residentie Archieven*, Manado, 1901, No. 1233, ANRI.
8. *Residentie Archieven*, Manado, 1862-1864, No. 441, ANRI.
9. *Residentie Archieven*, Manado, 1904, No. Gst. AG. 588, ANRI.
10. Surat Asisten Residen Manado kepada Residen Manado, 30-8-1917, *Financien*, 1083, ANRI.
11. Surat seorang pedagang Cina kepada Gubernur Jenderal 31-7-1917, *Financen*, 1083, ANRI.
12. Surat *Direktuur van Economische Zaken*, van Hart kepada Gubernur Jenderal 30-12-1935, BB. 116 (gebeim) ANRI.
13. Surat dari *Departement van Financien* kepada *Algemeene Secretaris*, 5 Desember 1896, *Financien*, 738, ANRI.

Laporan Tahunan

1. *Jaarverslag over 1921 van de Handelsvereeniging te Manado.*
2. *Verslag van de Volksbank Tonsea*, 1915.
3. *Verslag van de Volksbank Tonsea*, 1917.
4. *Verslag van de Volksbank Tonsea*, 1930.
5. *Verslag van de Volksbank Tonsea*, 1931.
6. Verslag voor 1926 Adeeling Landbouw.
7. *Mededeeling van het Centraal Kantoor voor de Statistiek*, 1934
8. *Verslag omtrent Handel en Nijverheid van Ned. Indie*, 1930.

Terbitan Berkala

1. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, (Vol. XLII, No. 1, 1994).
2. *Economisch Weekblad voor Nederland Indie*, (Batavia), 1932-1933.
3. *Journal of Southeast Asian Studies*, (Vol. 25, No. 1, Maret 1994).
4. *Koloniał Studen*. (No. 25, Th. 1941).
5. *Locomotief*, (Semarang), 9 Juni 1928.
6. *Minahasa Post* Februari 1934-Desember 1935.
7. *Pedoman Tani* (Bulanan-Manado), 1932-1933.
8. *Surat Kabar Kaum Muda* (Bandung), 6 Januari 1931.
9. *Surat Kabar Fikiran* (Manado), 30 Juli 1932.
10. *Surat Kabar Tjahaja Sijang* (Manado), 1919-1940.

Buku dan Artikel

Adam, L., *Pemerintahan di Minahasa*, Jakarta: Bhatara, 1975.

Awang, San Afri, *Kelapa: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Bertling, C. T., "Chineesche Coprahandel in Minahasa en de Sangir en Talaud eilund," *De Locomotief*, 77 (1928), 9 Juni: 35.

Boeke, J. H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1953.

Boot, Anne, "Export and Growth in de Colonial Economy," dalam Angus Maddison & Ge Prince (ed), *Economic Grouth in Indonesia 1920 1940*, Dordrecht: Foris Publication-Holland, 1992.

Breeder, J. H. R., "Kwaliteitverbetering van Copra in Noord Celebes," dalam *Economisch weekblad voor Nederland Indie*, 2 (1933) 14:585-587; 15: 630-632; 16: 661-663; 17:699-700; 18: 776-778.

_____ _____ "De inheemsche Zeepindustrie in de Minahasa," *Economisch Weekblad*, 23 Februari 1934.

_____ "De Zijde Cultuur in Minahasa," *Economisch Weekblad*, 2 (1933) 25: 1031-1033.

_____ "Copra in de Minahasa," *Economisch Weekblad*, 1 (1932) 21 Oct. 630-632; 28 Oct. 669-670; 4 Nov. 709-712; 11 Nov 762-764; 18 Nov. 811-813.

Burke, Peter, *History and Social Theory*, Cambridge: Polity Press, 1992.

Chaudhuri, K. N., *Trade and Civilization in de Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

DeGroot, J. H. C., "Eenige Beschouwingen over de Copracontracten ordo-

nantie," *Kolonial Studien*, (No. 28) 1941.

Departement van Landbouw (Kantor Landbouw Tondano), Nijverheid, en Handel, *Perkeboenan Kelapa Boemi Poetra*, Weltevreden: Landrukerij, 1926.

Departemen Pendidikan dan Kebndayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke-2, cetakan keempat), Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Djie, Liem Twan, *Perdagangan Perantara: Distribusi Orang-orang Cina di Jawa*, Jakarta: Gramedia-KITLV, 1995.

Door, C. L. Van, "Uittreksel uit een Rapport over het Volkscredietwezen in de Minahasa (1925)," dalam *Blaadje voor het Volkscredietwezen*, No. 7 (Juli) 1926.

Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (terjemahan); Jakarta: Bhratara, 1983.

Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia (terjemahan), Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1989.

Gonggrijp, G. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928.

Graafland, N., *Minahasa: Negeri, Rakyat, dan Budayanya*(terjemahan), Jakarta: Grafiti, 1991.

Heersink, Christiaan G., "Selayar and the Green Gold: The Development of the Coconnt Trade on an Indonesiao Island (1820-1950)," *Journal of Southeast Asian Studies, (Vol. 25, No. 1, Marel), 1994.*

Hendra, Limadharma, "Tanam Paksa Kopi dan Moniterisasi Petani Minahasa 1822-1870," (Tesis S2 UI Program Studi Ilmu Sejarah), Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI, 1987.

Harvey, Barbara Siffars, Permesta:*Pemberontakan Setengah Hati*(terjemahan), Jakarta: Grafiti Press, 1989.

Henley, David E. F., "Nationalism and Regionalism in Colonial Context Minahasa in the Dutch East Indies," (Doktoral Thesis) Australia:Australian National University, 1992.

_____, "Minahasa Mapped: Illustrated Notes on Cartography and History in Minahasa," dalam H. Djohani (peny), *Focus on Minahasa*. Delft Nusantara Ethnographic Museum, 1994.

Hunger, F. W. T., *Cocos Nucifera: Handboek voor de Kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten*, Amsterdam: Scheltema & Hplkema's Boekhandel, 1916.

International Encyclopedia of the Social Sciences (Vol 9 dan 10), New York. The Macmillan Company & The Free Press, 1972.

Kalangi, N. S., " Orang Minahasa: Beberapa Aspek Kemasyarakatan dan Kebudayaan," *Majalah Lembaga Penelitian Studi DGI*, 1990.

Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton(terjemahan), Jakarta: LP3ES, 1993.

Krantz, Frederick (ed), *History from Below*, New York: Basil Blackwell, 1988.

Lapian, A. B. "Tjahaja Sijang di Tengah-tengah Pers Sulawesi Utara 1869-1942," dalam Abdurrachman Suryomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Deppen RI-LEPENAS-LIPI, 1980.

Leirissa, R. Z., "Copracontracten: An Indication of Economic Development in Minahasa during the Late Colonial Period," (paper presented at the Academy Colloqium Historical Foundation of a National Economiy in Indonesia) Amsterdamm: Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen, (September) 1994.

_____, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Grafiti, 1991.

Leur, J. C. van, *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Lindblad, J. Thomas, "The Economic Develompment of the Indonesian Provincies Outside Java in the Late-and Post-Colonial Times," (Paper diskusi pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta-tidak diterbitkan), Jakarta: 1992.

_____, "The Contribution of Foreign Trade to Colonial State Formation in Indonesia, 1900-1930," (Paper pada seminar Java in the Late Colonial), Wasenar: (tanpa tahun), dimuat pula dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia. Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden:KITLV Press, 1994.

_____, "De Opkomst van de Buiten Gewesten," dalam A. H. P. Clemens & J. Th. Lindblad, *Het Belang van Buiten Gewesten 1870-1942*, Amsterdam: Neha, 1989.

_____, "Economic Growth in the Outer Islands, 1910-1940," dalam J. Th. Lindblad (ed), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*, Leiden: Programme of Indonesian Studies,

1993.

Lloyd, Christopher, *Explanation in Social History*, New York: Basil Blackwell, 1988.

Mc Cawley, Peter, "Pertumbuhan Sektor Industri," dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley (peny), *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Minahasa VII Berkas Hukum Adat III, (diterjemahkan oleh R.E.H. Kotambunan), Manado, Universitas Samratulangi, 1987.

Pantouw, J. M. T., "What's a Coconut Worth," (paper disampaikan dalam Konferensi Perkelapaan), Manado, Januari 1992.

Pantouw, Bertha, "Beberapa Perubahan Kebudayaan di Minahasa Tengah 1829-1859: Suatu Kajian Sejarah Berdasarkan Tulisan-tulisan J. G. Schwarz," (Disertasi Doktor bidang Sejarah UI), Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1994.

Polanyi, Karl, C. M. Arensberg, dan H. W. Pearson, "Ekonomi sebagai Proses Sosial," dalam Hans-Dieter Evers (peny), *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Dunia Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Post, Peter, "Characteristic of Japanese Entrepreneurship in the Prewar Indonesian Economy," (Makalah pada Academy Colloquium Historical Foundations of a National Economi in Indonesia, 1890s-1990s), Amsterdam: Koninklijke Nederlandsch Academie van Wetenshappen, 1994.

_____, "Japan and The Integration of Netherlands East Indies into the World Economy, 1868-1942," dalam *Rima (Review of Indonesian and Malaysian Affairs)*, (Summer Edition), 1993, P. 134-165.